

**PENGARUH PENGELUARAN PEMBANGUNAN DAN TINGKAT SUKU
BUNGA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA :
ANALISIS PERANAN INVESTASI SWASTA DAN EKSPOR
(PERIODE 1987 – 2006)**

*THE INFLUENCE OF DEVELOPMENT EXPENDITURE AND
INTEREST RATE TO ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA:
ANALYSIS OF THE ROLE OF PRIVATE INVESTMENT AND EXPORT
IN INDONESIA (PERIOD 1987 – 2006)*

ANDI IKA FAHRIKA



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2008

**PENGARUH PENGELUARAN PEMBANGUNAN DAN TINGKAT SUKU
BUNGA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA :
ANALISIS PERANAN INVESTASI SWASTA DAN EKSPOR
(PERIODE 1987 – 2006)**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Ekonomi Sumberdaya

Disusun dan diajukan oleh

ANDI IKA FAHRIKA

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Andi Ika Fahrika
Nomor Mahasiswa : P0400205002
Program Studi : Ekonomi Sumberdaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, September 2008

Yang menyatakan

Andi Ika Fahrika

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan terealisasikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Berkaitan dengan itu, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Prof. Dr. M. Yunus Zain, M.A. sebagai Ketua Komisi Penasihat dan Dr. Madris, DPS., M.Si. sebagai Anggota Komisi Penasihat atas segala arahan dan petunjuk yang diberikan kepada penulis sejak awal penulisan hingga tesis ini selesai.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Dr. I Made Benyamin, M.Ec., Dr. Paulus Uppun, M.A dan Dr. Tadjuddin Parenta, M.A. yang telah banyak memberikan koreksi dan petunjuk hingga tesis ini dapat terwujud sesuai dengan harapan penulis.

Selanjutnya, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pimpinan English Language Center (ELC) beserta seluruh staff yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan Program Magister di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar hingga selesai.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pimpinan Badan Pusat Statistik Makassar dan pimpinan Kantor Bank Indonesia Makassar, yang telah banyak membantu dalam pengumpulan data dan informasi.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan pula kepada rekan-rekan mahasiswa PPs teristimewa Nia, Roy, Mumut, Suriati, Yadi dan Ira, yang banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Terima kasih yang tiada terhingga juga disampaikan kepada orang tua tercinta Andi Ansar Mas, B.Sc. dan Andi Nuraeni, S.Pd.,M.Pd. dan suami tersayang: Muh. Abubakar, yang telah memberi dukungan yang ikhlas sehingga penulis dapat menempuh pendidikan di Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin hingga selesai.

Akhirnya, kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu per satu, penulis juga berterima kasih atas segala bantuan yang diberikannya dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga segala bantuan, petunjuk, dorongan, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah subhanahu wa taala, amin!

Akhirnya, semoga tesis ini ada manfaatnya bagi kita semua.

Makassar, September 2008

Andi Ika Fahrika

ABSTRAK

ANDI IKA FAHRIKA. *Pengaruh Pengeluaran Pembangunan dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Analisis Peranan Investasi Swasta dan Ekspor (Periode 1987-2006)* (dibimbing oleh M. Yunus Zain dan Madris).

Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) pengaruh pengeluaran pembangunan terhadap investasi swasta di Indonesia, (2) pengaruh tingkat suku bunga terhadap investasi swasta di Indonesia, (3) pengaruh pengeluaran pembangunan terhadap ekspor di Indonesia, (4) pengaruh tingkat suku bunga terhadap ekspor di Indonesia, (5) pengaruh investasi swasta terhadap ekspor di Indonesia, (6) pengaruh investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, (7) pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, (8) pengaruh pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan (9) pengaruh tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Data yang dianalisis adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai publikasi selama tahun pengamatan 1997 – 2006. Metode yang digunakan adalah analisis regresi dalam model persamaan struktur (SEM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta di Indonesia, (2) tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi swasta di Indonesia, (3) pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor di Indonesia, (4) tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ekspor di Indonesia, (5) investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor di Indonesia, (6) investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, (7) ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, (8) pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan (9) tingkat suku bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan merupakan kinerja pokok perekonomian suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tentunya adalah pertumbuhan yang berkualitas, dimana pertumbuhan yang terjadi memiliki sensitifitas terhadap pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan perkembangan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu setiap negara maju maupun negara yang sedang berkembang, tidak luput dari usaha-usaha untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh setiap negara. Dengan tercapainya pertumbuhan ekonomi diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini diidam-idamkan.

Kinerja ekonomi Indonesia yang dapat diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi, stabilisasi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam perjalanannya mengalami berbagai tantangan eksternal di luar kendali, diantaranya, bencana tsunami di Aceh dan gempa di daerah Sumatera, kenaikan suku bunga Amerika Serikat, kenaikan harga minyak dunia dan peristiwa pemboman di Bali. Adanya tekanan eksternal ini juga diakui oleh Bank Indonesia. (Bea Cukai, 2006)

Tabel 1. Angka Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dari tahun 1992 sampai tahun 2006.

Tahun	Nilai %
1992	6.82
1993	6.46
1994	7.54
1995	8.21
1996	7.99
1997	4.65
1998	-13.21
1999	0.79
2000	4.92
2001	3.44
2002	3.80
2003	4.72
2004	5.03
2005	5.68
2006	5.48

Sumber : Badan Pusat Statistik tahun 1989, 1992, 1997, 2002, 2006 dan 2007.

Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan ada beberapa tantangan pokok yang dihadapi yaitu :1. Menurunkan pengangguran dan kemiskinan. Dengan jumlah pengangguran yang semakin bertambah, kualitas pertumbuhan akan ditingkatkan. Kegiatan ekonomi akan didorong agar mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi jumlah penduduk miskin yang masih besar. Tantangan ini cukup

berat karena sejak krisis, kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja masih rendah. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Tantangan semakin berat dengan kecenderungan investasi yang melambat dan sektor industri pengolahan non-migas yang melemah. Sementara itu masih banyaknya kendala di dalam negeri yang menghambat peningkatan investasi dan ekspor non-migas secara berkelanjutan. 3. Menjaga stabilitas ekonomi. Dengan terbatasnya kemampuan keuangan negara untuk mendorong perekonomian, dengan berbagai kendala yang menghambat. (Bappenas, 2003)

Usaha-usaha dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi terus dilakukan agar dapat menjaga kesinambungan pembangunan secara berkelanjutan. Tantangan ini cukup berat mengingat kondisi sektor riil yang belum sepenuhnya pulih, ditandai dengan masih rendahnya investasi dan melemahnya kinerja ekspor non-migas. (Bappenas, 2003)

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan berbagai unsur aparatur negara merupakan bagian dari aktivitas keuangan negara. Pengelolaan pengadaan barang dan jasa merupakan hal yang penting, karena akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, dan pada akhirnya akan mempengaruhi sukses atau gagalnya bangsa ini dalam mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan.

Untuk itu perlu terus membangun prasarana ekonomi seperti listrik, telekomunikasi, pelabuhan, jalan dan lain-lain untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, efisiensi pemanfaatan dari prasarana yang ada, dan membangun sektor-sektor lainnya termasuk sumber daya manusia maupun teknologi nasional. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dapat mencegah ekonomi biaya tinggi.

Berdasarkan Tabel 2 di bawah ini. Kita dapat melihat pengeluaran pembangunan dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun yang jadi permasalahan "kenapa masih terjadi ekonomi biaya tinggi ?"

Tabel 2 : Angka Pengeluaran Pembangunan di Indonesia Tahun 1986/1987 sampai dengan tahun 2004

Tahun	Pengeluaran Pembangunan (Milyar Rp)	Persentase Pertumbuhan (%)
1986/1987	8.332	-
1987/1988	9.477	13.7
1988/1989	12.251	29.3
1989/1990	13.834	12.9
1990/1991	19.452	40.6
1991/1992	21.764	11.9
1992/1993	26.906	23.6
1993/1994	28.428	5.7
1994/1995	30.692	8.0
1995/1996	28.781	-6.2
1996/1997	35.952	24.9
1997/1998	38.36	6.7
1998/1999	67.869	76.9
2000	78.312	15.4
2001	41.585	-46.9
2002	40.271	-3.2
2003	69.247	7.2
2004	61.45	-11.3

Sumber : Badan Pusat Statistik 1991,1992,1997,2002, 2006 dan 2007

Krisis ekonomi menurunkan kemampuan dalam penyediaan jasa pelayanan sarana dan prasarana, terutama karena berkurangnya kemampuan pendanaan dalam memenuhi kebutuhan operasi dan pemeliharaan jaringan sarana dan prasarana fisik yang telah ada. Upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat penyediaan jasa pelayanan sarana dan prasarana menghadapi tiga dimensi permasalahan. **Pertama**, pembangunan

sarana dan prasarana tidak mudah karena mencakup penggunaan kapital yang sangat besar, waktu pengembalian modal yang panjang, penggunaan lahan yang cukup luas, pemanfaatan teknologi tinggi, perencanaan, dan implementasi perlu waktu panjang untuk mencapai skala ekonomi yang tertentu. Di lain pihak kemampuan ekonomi nasional ini sangat terbatas, baik dana yang berasal dari pemerintah maupun swasta.

Kedua, pembangunan sarana dan prasarana merupakan prakondisi bagi berkembangnya kesempatan dan peluang baru di berbagai bidang. Peningkatan jumlah penduduk mendorong perlunya tambahan pelayanan sarana dan prasarana **Ketiga**, menghadapi persaingan global dan sekaligus memenuhi permintaan masyarakat akan jasa pelayanan sarana dan prasarana memerlukan restrukturisasi dalam penyelenggaraan usaha pelayanan sarana dan prasarana. (Propenas, 2001)

Mengingat begitu pentingnya keberadaan infrastruktur, sudah sewajarnya jika pembangunan infrastruktur mendapatkan prioritas dalam pembangunan nasional. Namun krisis ekonomi berdampak negatif terhadap laju pembangunan infrastruktur. Kemampuan pemerintah membiayai pembangunan di masa depan makin terbatas karena wajib membayar hutang dalam negeri dan hutang luar negeri. Menurunnya kemampuan keuangan pemerintah, menyebabkan memburuknya kualitas pelayanan infrastruktur dan tertundanya pembangunan infrastruktur baru. Kerusakan jaringan infrastruktur ini dapat meningkatkan biaya pengguna (*user costs*) yang sangat besar, menghambat mobilitas ekonomi, meningkatkan harga barang serta mempersulit upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Bappenas, 2003)

Secara mendasar, pembiayaan rehabilitasi dan perluasan jaringan infrastruktur memerlukan biaya besar yang di luar kapasitas pembiayaan pemerintah. Saat ini

pemerintah hanya mampu membiayai upaya perbaikan dan perawatan (*maintenance*) infrastruktur yang sudah ada. Dengan demikian, pemerintah perlu mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur. Pemerintah perlu menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong masuknya investor dalam dan luar negeri.

Namun ada beberapa kendala, *pertama*, investasi swasta asing masih belum meningkat, padahal sebagian besar proyek kemitraan mengandalkan pinjaman asing. *Kedua*, sumber dana pembangunan infrastruktur dari perbankan sangat terbatas karena ketidakcocokan antara jangka waktu penyelesaian dan pengembalian proyek dengan jangka waktu pinjaman yang diberikan. Pada umumnya proyek infrastruktur memerlukan waktu antara 15-30 tahun untuk melunasi investasinya, sedangkan perbankan umumnya tidak tertarik mendanai proyek-proyek berjangka panjang. Karena itu, perlu terobosan inovatif untuk mengatasi kebutuhan dana jangka panjang bagi pembangunan infrastruktur. Sementara itu, tingginya risiko investasi di Indonesia menyebabkan rendahnya partisipasi swasta di bidang infrastruktur. Keadaan tersebut diperburuk lagi oleh kenyataan bahwa kredibilitas mekanisme hukum di Indonesia sangat lemah. Aturan-aturan yang ada dalam mengikutsertakan pihak swasta kurang jelas dan tidak memenuhi kebutuhan pemerintah, investor swasta atau konsumen.

Dalam kaitan dengan kondisi di atas, perlu ditekankan kembali bahwa ekonomi biaya tinggi dan iklim investasi yang kurang baik adalah permasalahan utama yang dapat menyebabkan lambannya pertumbuhan ekonomi.

Tingkat suku bunga merupakan salah satu faktor penentu orang melakukan investasi dan kegiatan ekspor. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka kecenderungan

untuk berinvestasi juga rendah, begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat suku bunga maka kecendrungan untuk berinvestasi juga tinggi karena tingkat suku bunga merupakan "biaya" yang harus dikeluarkan investor dalam pengambilan kredit perbankan untuk melakukan kegiatan investasi. Maka itulah ekspansi kredit perbankan bisa melalui perubahan tingkat suku bunga kredit. Penurunan tingkat suku bunga akan mendorong para investor untuk mengambil kredit yang akan digunakan untuk kegiatan investasi. Jadi tingkat suku bunga tersebut berperan penting dalam peningkatan ekspansi kredit perbankan yang selanjutnya akan mendorong kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan akan tercapai. Perkembangan tingkat suku bunga juga berfluktuasi, hal ini dapat dilihat pada data statistik yang menunjukkan bahwa tingkat suku bunga pada tahun 1997 yaitu baik tingkat suku bunga kredit modal kerja sebesar 21.98% maupun suku bunga kredit investasi yaitu sebesar 17.34%, dan pada tahun 1998 tingkat suku bunga kredit modal kerja dan suku bunga kredit investasi mengalami kenaikan yaitu tingkat suku bunga kredit modal kerja yaitu 32.27% dan tingkat suku bunga kredit investasi sebesar 23.16% dan pada tahun 1999 tingkat suku bunga kredit ini kembali mengalami penurunan yaitu tingkat suku kredit modal kerja sebesar 28.89% dan tingkat suku bunga kredit investasi sebesar 22.93%. Tingkat suku bunga yang berfluktuasi ini tentulah dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya saja pemerintah menggunakan salah satu instrumen kebijakan tingkat suku bunga untuk menekan turun tingkat inflasi yang tinggi dengan mengupayakan tingkat bunga (*interest rate*) ke tingkat yang lebih tinggi, yang secara drastis hal ini akan menekan turun ekspansi kredit perbankan. Kebijakan penurunan tingkat suku bunga yang menyebabkan pertumbuhan negatif kredit perbankan, dilakukan apabila perekonomian mengalami pemanasan

(*overhetaed*), seperti yang dialami Indonesia pada tahun 1990-1991 dan 1994 sampai pertengahan 1996 serta 1997-1998 yang ditujukan untuk menekan turun permintaan agregat. (Panetto, 1998).

Penurunan bunga pinjaman juga tidak berarti terbuka luasnya akses kredit bagi sektor riil, karena hanya sektor riil yang memenuhi persyaratan tertentu, terutama dalam aspek keuangan, yang mempunyai akses pada kredit perbankan. Dengan kata lain, penurunan suku bunga tidak dengan sendirinya menggerakkan sektor riil secara optimal. Bagi suatu perusahaan, untuk mendapatkan akses kredit perbankan paling tidak membutuhkan persyaratan kondisi keuangan yang cukup baik. Hal ini dipersyaratkan oleh supervisi Bank Indonesia. Karena itu perusahaan baru atau yang kondisi keuangannya tidak baik, tidak mempunyai akses pada kredit perbankan. (Juoro, 2007)

Banyak pihak yang mengharapkan bahwa penurunan suku bunga saat ini dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Memang dalam buku-buku teks ekonomi makro dijelaskan bahwa hubungan antara tingkat suku bunga dan output agregat ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) adalah negatif, dan hubungan ini terjadi lewat efek pertumbuhan investasi atau efek penurunan tabungan masyarakat.

Namun perlu disadari bahwa di dalam teori-teori ekonomi, setiap hubungan antara dua variabel selalu didasarkan pada *ceteris paribus*, atau asumsi bahwa faktor-faktor berpengaruh lainnya mendukung atau paling tidak tetap tidak berubah. Jadi dalam hubungan antara suku bunga dan pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa menurunnya suku bunga akan menaikkan PDB (atau berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB) hanya jika pengusaha/investor yang memiliki dana untuk investasi dan masyarakat yang memiliki tabungan di bank atau lembaga keuangan lainnya

merespon sesuai hipotesa. Sekarang masalahnya di Indonesia adalah bahwa selama ini sejak krisis ekonomi 1997/98, banyak faktor lain selain suku bunga yang juga menjadi pertimbangan serius bagi setiap investor sebelum mengambil keputusan untuk menanam modalnya di Indonesia, seperti kondisi infrastruktur, keamanan, kepastian hukum, stabilitas sosial dan politik, ketersediaan sumber daya manusia dan industri pendukung, dan lain-lain. (Kadin, 2006)

Investasi sebagai penggerak perekonomian, karena itu kebijaksanaan investasi semestinya diarahkan pada kegiatan yang berorientasi ekspor sehingga tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga menambah devisa sehingga memperkuat nilai rupiah.

Salah satu faktor pendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi adalah investasi, baik dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA). Jumlah investasi sebagian besar harus datang dari sektor swasta. Maka yang paling penting adalah membangun iklim investasi yang menarik, terutama diarahkan untuk menciptakan iklim kebijaksanaan yang kondusif serta rekomendasi untuk mengembangkan prasarana dan sarana pendukung investasi dunia usaha, juga penyediaan informasi dan peluang usaha yang seimbang.

Lemahnya kegiatan investasi baru juga oleh karena bagi pengusaha kepastian hukum sejak reformasi telah berkurang. Pelaksanaan otonomi daerah menambah ketidakpastian. Indonesia sekarang terkenal sebagai high-cost economy. Salah satu sumber ekonomi biaya tinggi adalah kurang memadainya infrastruktur, karena sejak 1998 praktis tidak ada investasi pemerintah di bidang infrastruktur ini, hal ini dapat dilihat investasi menurun secara drastis, dimana pada tahun 1997, PMDN sebesar Rp. 119.872,9 miliar

dan PMA sebesar US\$ 33.832,5 juta, dan pada tahun 1998 PMDN sebesar Rp. 60.749,3 miliar dan PMA sebesar US\$ 13.563,1 juta.

Pada umumnya kebijaksanaan pemerintah sekarang untuk mencapai laju pertumbuhan lebih tinggi adalah cukup konservatif (*prudent*), menyadari bahwa banyak tergantung dari jumlah investasi, yang sebagian besar harus datang dari sektor swasta. Maka yang paling penting adalah membangun iklim investasi yang menarik. Kebijakan fiskal dan moneter adalah sangat penting dan diperlukan akan tetapi belum cukup untuk meraih pertumbuhan tinggi bagi ekonomi Indonesia. Yang masih diperlukan adalah kebijakan-kebijakan untuk mengimbangi kelemahan struktural, seperti penegakan hukum untuk menjamin kepastian usaha. Pemerintah sendiri harus memaksimalkan investasi lewat anggaran belanjanya, misalnya untuk membangun infrastruktur.

Investasi asing, sekalipun minat tetap tinggi sebagaimana terlihat dari cukup tingginya tingkat persetujuan PMA, realisasinya rendah karena investor menganggap belum terjadinya perbaikan yang berarti dalam lingkungan investasi.

Sejak krisis ekonomi 1997, praktis investasi sangat seret untuk masuk ke Indonesia. Bahkan, perusahaan asing yang berada di Indonesia menunda investasi karena ketidakpastian hukum dan lemahnya jaminan keamanan. Mereka cenderung untuk melakukan investasi baru di tempat lain. Investor baru takut masuk ke Indonesia

Pada tahun 2006 stabilitas ekonomi makro dapat terjaga dengan cukup baik, namun hal tersebut tidak berhasil membangkitkan rasa optimis di kalangan masyarakat. Tingginya tingkat ketidakpastian di kalangan dunia usaha merupakan penyebab utama dari rendahnya tingkat investasi sepanjang tahun 2006 lalu, dan ini tidak lepas dari tidak kunjung kondusifnya iklim usaha di sektor produksi riil. Berbagai kebijakan yang

dikeluarkan pemerintah dikatakan tidak efektif untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif karena seringkali dibayangi oleh keragu-raguan pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan tersebut.

Dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang hanya sekitar 5,48 persen selama tahun 2006, Selain itu, banyaknya bencana alam yang terjadi di tahun 2006 dan 2007 juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan fokus pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhannya terbagi ke faktor lain, yaitu pemulihan daerah bencana alam.

Di tempat terpisah, Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah mengatakan, tanda-tanda bangkitnya perekonomian Indonesia belum terlihat jelas pada triwulan I-2007. Pertumbuhan investasi masih sangat rendah, penyaluran kredit bahkan negatif. Dibutuhkan perbaikan iklim investasi dengan segera. (Kompas, 2007)

Untuk mendorong investasi kata Burhanuddin, maka sejumlah masalah struktural yang ada saat ini harus diselesaikan. Masalah tersebut antara lain lemahnya dukungan iklim investasi dan struktur pasar, belum memadainya ketersediaan infrastruktur, permasalahan birokrasi, rendahnya produktivitas, dan inefisiensi faktor produksi (Kompas, 2007)

Menyimak hal tersebut, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 yang diperkirakan sekitar 7 persen akan banyak bergantung pada konsumsi masyarakat. Namun, dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan juga tingkat kemiskinan yang tinggi, maka pertumbuhan konsumsi akan lebih banyak ditentukan oleh bagian masyarakat yang berpendapatan tinggi. Konsumsi pemerintah turut memperkuat sumbangan konsumsi bagi pertumbuhan ekonomi.

Seberapa jauh kita dapat mengharapkan investasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi? Melihat dari perkembangan ekonomi sejauh ini memang kita tidak lagi dapat mengharapkan pertumbuhan dari konsumsi rumah tangga untuk tumbuh tinggi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga sulit untuk melebihi tingkat 3,5% (y-o-y), karena itu mau tidak mau investasi harus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Ekspor sangat penting dalam menunjang perekonomian Indonesia, karena ekspor tidak saja sebagai sumber penerimaan devisa tetapi juga sebagai perluasan pasar bagi produksi barang-barang domestik. (Muhammad, 2007)

Terdapat beberapa pertanyaan yang menarik menyangkut konsep manfaat perdagangan. Misalnya; mengapa perdagangan internasional tidak selalu menyebabkan pertumbuhan, atau mengapa pertumbuhan yang disebabkan lebih sering hanya terbatas pada manfaat statis, bukan dinamis. Di berbagai negara yang telah maju sebagai akibat dari pertumbuhan dari ekspor, kemajuan tersebut tidak meningkatkan pembangunan perekonomian secara umum. Di beberapa negara berkembang pertumbuhan yang kuat dari ekspor telah gagal menyebar secara substansial pada sektor yang lain, dan dengan demikian tidak menimbulkan pembangunan yang lebih tersebar dalam perekonomian domestik (Hakim, 2002).

Ekspor menunjang perekonomian Indonesia. Untuk mendorong perdagangan dan peningkatan ekspor, Indonesia masih menghadapi permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan, di antaranya: (1) masih tingginya biaya ekonomi yang dihadapi oleh dunia usaha yang selama ini telah menyebabkan turunnya daya saing produk ekspor, (2) masih rendahnya penggunaan produk dalam negeri, baik oleh industri maupun konsumen, (3) banyaknya pungutan retribusi di daerah telah menghambat distribusi barang dan jasa,

(4) keterbatasan dan rendahnya kualitas infrastruktur seperti jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik, jaringan komunikasi mengakibatkan tingginya biaya ekspor, (5) proses dan prosedur ekspor-impor masih perlu disempurnakan untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi, termasuk mengurangi pungutan liar; (6) masih besarnya hambatan non tarif di pasar ekspor. (Bappenas, 2004)

Dengan anjloknya rupiah akibat krisis saat ini, peluang ekspor sesungguhnya terbuka lebar karena pada dasarnya daya saing produk-produk ekspor Indonesia meningkat pesat. Namun demikian, peluang tersebut tampaknya belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya permintaan karena kekuatiran importer luar negeri terhadap kelangsungan sediaan (*supply*) produk ekspor Indonesia, dan keterbatasan kredit untuk modal kerja serta pembiayaan perdagangan ekspor dan impor. Akibat krisis ekonomi dan ambruknya sektor perbankan, permasalahan pemanfaatan dari utilisasi kapasitas pabrik-pabrik pelaku ekspor yang baru mencapai sekitar 60 persen perlu mendapat perhatian khusus. (Propenas, 2001)

Selain itu upaya pengembangan ekspor juga mengalami kendala administrasi dan prosedural yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi sebagai akibat dari lamanya penyelesaian dokumen kepabeanan untuk transaksi ekspor-impor, tidak efisiennya penanganan pelabuhan untuk ekspor-impor, serta masih berjangkitnya berbagai pungutan tidak resmi (Propenas, 2001)

Pemerintah harus memaksimalkan investasi lewat anggaran belanjanya, dengan cara membangun infrastruktur menguntungkan dan mewujudkan iklim yang kondusif melalui serangkaian pembenahan kebijakan dan perbaikan institusi untuk menarik kegiatan berinvestasi di Indonesia utamanya investasi swasta. High cost economy dapat

juga dihindari dengan adanya pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur untuk kelancaran arus dan distribusi barang dalam negeri serta peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan usaha di Indonesia merupakan bagian dari peranan pemerintah dalam meningkatkan ekspor. Pengeluaran pembangunan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan bernegara yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini diidam-idamkan.

Penurunan tingkat suku bunga dan pemberian kebijakan-kebijakan pinjaman akan meningkatkan ekspansi kredit perbankan seperti kredit investasi, kredit konsumsi dan kredit modal kerja. Dengan berbagai kebijakan ini maka kecenderungan pengusaha untuk melakukan investasi juga semakin meningkat. Penurunan tingkat suku bunga ini juga merupakan motivator bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan konsumsi.

Penurunan investasi secara langsung berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi. Dari sisi lalu lintas modal, masih terjadi pelarian modal modal di mana arus modal keluar oleh swasta masih lebih besar dibandingkan arus modal keluar oleh swasta lebih besar dibandingkan arus modal swasta yang masuk. Penurunan tingkat investasi ini disebabkan oleh beberapa hal, terutama faktor keamanan dan stabilitas politik. Situasi keamanan yang masih belum membaik telah menghambat niat investor dalam dan luar negeri untuk segera menanamkan modalnya di Indonesia. Untuk itu pemulihan keamanan dan ketertiban serta stabilitas politik menjadi prasyarat bagi meningkatnya kegiatan investasi. (Propenas, 2001)

Meningkatnya ekspor baik ekspor migas maupun non migas baik barang maupun jasa akan turut memacu pertumbuhan ekonomi dan menambah cadangan devisa.

Oleh karena itu kebijakan perdagangan luar negeri pemerintah dan pengeluaran pemerintah diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan daya saing global produk Indonesia serta meningkatkan peranan ekspor dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah berupa pengeluaran pembangunan seperti penyediaan fasilitas dan prasarana untuk efektifitas dan efisiensi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Kebijakan untuk mendukung peningkatan ekspor tersebut diantaranya penyederhanaan prosedur kepabeanan, peningkatan frekuensi dan optimisasi upaya diplomasi perdagangan baik dalam bilateral maupun multilateral, serta mengurangi secara bertahap hambatan-hambatan dalam perdagangan luar negeri sesuai dengan komitmen internasional dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Melalui kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing global yang berdampak terhadap peningkatan ekspor Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul keinginan untuk mengadakan penelitian yang berjudul yang berjudul ***"Pengaruh Pengeluaran Pembangunan dan Tingkat Suku Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Analisis Peranan Investasi Swasta dan Ekspor (1987-2006)"***.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar pengaruh pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun melalui investasi swasta dan ekspor.
- 2.. Seberapa besar pengaruh tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun melalui investasi swasta dan ekspor.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun melalui investasi swasta dan ekspor.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun melalui investasi swasta dan ekspor.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan deskripsi mengenai besarnya pengaruh pengeluaran pembangunan dan tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui investasi swasta dan ekspor.
2. Memberikan sumbangan pemikiran sekaligus sebagai bahan referensi bagi pihak atau lembaga yang tertarik untuk menganalisis masalah yang sama dengan penulisan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Kajian Teoritis

Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan adalah tujuan yang ingin dicapai. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan tersebut, akan dilaksanakan beberapa program pembangunan nasional di bidang ekonomi yaitu : **Pertama**, menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan agar tercipta iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi dan ekspor yang sangat penting bagi percepatan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan **Kedua**, memacu peningkatan daya saing terutama untuk meningkatkan ekspor non migas, termasuk pariwisata, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional **Ketiga**, menciptakan stabilitas ekonomi dan keuangan agar tercipta iklim yang kondusif bagi peningkatan investasi dan ekspor yang sangat penting bagi percepatan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. **Keempat**, memacu peningkatan daya saing terutama untuk meningkatkan ekspor non migas, termasuk pariwisata dan memperluas ketahanan ekonomi nasional. **Kelima** meningkatkan investasi dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi, terutama berdasarkan ekuitas daripada berdasarkan pinjaman. **Keenam**, menyediakan sarana dan prasarana penunjang pembangunan ekonomi transportasi, pos, telekomunikasi, informatika, listrik, energi dan pertambangan, serta pengairan dan irigasi). (Propenas, 2001)

1. **Pertumbuhan Ekonomi**

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada umumnya negara berkembang (*Developing Countries*), seperti halnya Indonesia, menekankan tujuan pembangunan pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Kenaikan laju pertumbuhan ekonomi tersebut akan menambah output kekayaan suatu masyarakat, sehingga taraf hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

1.1. ***Pengertian Pertumbuhan Ekonomi***

Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai “Pertumbuhan Ekonomi”, sebaiknya kita terlebih dahulu harus mengetahui apakah sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu. Pertumbuhan ekonomi dapat kita definisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi antara satu dengan yang lain sehingga terjadi proses pertumbuhan (Boediono, 1981).

.Untuk mengukur besarnya pertumbuhan ekonomi pada suatu negara/daerah dapat digunakan suatu indikator penting, yaitu nilai Produk Domestik Bruto (PDB) atau nilai Produk Domestik Regional Bruto. Menurut Sukirno (1985) Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian dalam masa satu tahun.

Pengukuran PDB atau PDRB dapat diinterpretasikan melalui tiga pendekatan, yaitu dengan metode produksi, pendapatan dan metode pengeluaran. Hal ini dapat dijelaskan antara lain :

1. Menurut Pendekatan Produksi. PDB atau PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu satu tahun. Dalam menghitung PDB atau PDRB dengan pendekatan produksi yang dihitung adalah nilai produksi tambahan atau *value added* yang diciptakan. Dengan cara ini dapat dihindarkan berlakunya perhitungan ganda.
2. Menurut Pendekatan Pendapatan. PDB atau PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa yang dimaksud adalah gaji dan upah, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan sebelum dipotong pajak langsung.
3. Menurut Pendekatan Pengeluaran. PDB atau PDRB adalah semua komponen pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga dalam bentuk Konsumsi (C), perusahaan dalam bentuk Investasi (I), Pemerintah (G), dan perdagangan luar negeri dalam bentuk Net Ekspor (X-M) biasanya dalam jangka waktu satu tahun.

1.2. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi

Dalam ilmu ekonomi tidak hanya terdapat satu teori pertumbuhan, tetapi terdapat banyak teori pertumbuhan. Berbagai ekonom besar, sejak lahirnya ilmu ekonomi, mempunyai pandangan atau persepsi yang tidak selalu sama mengenai proses pertumbuhan suatu perekonomian. Seringkali teori pertumbuhan seorang ekonom dipengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh ekonom itu, sehingga aspek-aspek yang ditonjolkan dalam teorinya mencerminkan kecenderungan ideologinya.

Ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi (Suparmoko, 1998) yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Teori Pertumbuhan Adam Smith

Menurut Adam Smith, untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas bertambah. Disebutkan pula olehnya bahwa sebelum ada pembagian kerja harus ada akumulasi modal di mana modal ini berasal dari investasi dan tabungan. Di samping itu pasar harus seluas mungkin, agar dapat menampung hasil produksi dan karena perdagangan luar negeri meluaskan pasar, maka pasar terdiri dari pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Menurut Smith, pertumbuhan bersifat kumulatif, artinya jika ada pasar yang cukup dan akumulasi capital, akan ada pembagian kerja dengan produktivitas tenaga kerja akan naik. Kenaikan ini menyebabkan penghasilan nasional naik untuk kemudian memperbesar jumlah penduduk dan selanjutnya memperluas pasar.

b. Teori Harrod-Domar (2000)

Kedua Pakar ini berpendapat bahwa akumulasi capital dalam pembangunan ekonomi punya peranan ganda, yaitu menimbulkan pendapatan dan menaikkan kapasitas produksi.

Untuk mempertahankan keseimbangan pada tingkat *full employment*, maka diperlukan pengeluaran berupa investasi untuk menyerap kenaikan output yang terjadi sesuai dengan pertambahan penduduk untuk menjaga agar pendapatan per kapita tidak turun. Semakin besar pendapatan nasional, maka investasi yang dibutuhkan juga semakin besar.

Jika kenaikan investasi tidak disertai dengan naiknya pendapatan nasional, maka akan menyebabkan kapital dan tenaga kerja menganggur, sebab capital baru (yang timbul karena adanya investasi) tidak dapat digunakan.

2. Pengeluaran Pembangunan

Di negara-negara sedang berkembang, kedudukan sektor pemerintah memberi pengaruh yang sangat luas terhadap kehidupan perekonomian nasional dan daerah. Dalam banyak aspek, sektor pemerintah ikut mempengaruhi roda perputaran ekonomi masyarakat, baik secara langsung langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, misalnya dalam menyediakan barang dan jasa produksi maupun konsumsi di samping barang publik, memelihara stabilitas ekonomi campur tangan langsung dalam distribusi barang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan dalam upaya mempercepat proses pertumbuhan ekonomi nasional. (Noor, 2002)

Pengeluaran pemerintah terdiri dari dua kelompok besar, rutin dan pembangunan,. Pengeluaran rutin mencakup berbagai pengeluaran yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah, guna mendukung pelaksanaan program pembangunan. Di samping itu pengeluaran rutin juga menampung pos-pos yang berkaitan dengan berbagai pengeluaran, untuk pengeluaran rutin mempunyai peranan dan fungsi yang cukup penting di dalam memperlancar roda pemerintahan. Hal ini terlihat dari peranan pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja pembelian inventaris, belanja pemeliharaan barang, belanja perjalanan dinas, dan belanja-belanja lain bagi aparatur pemerintah. (Noor, 2002)

Pengeluaran pembangunan dimaksudkan sebagai pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik. Pengeluaran pembangunan

berkaitan erat dengan usaha pemerintah di dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Pertama-tama melalui pengeluaran pembangunan dilaksanakan fungsi alokasi, yaitu memakai tabungan pemerintah untuk berbagai kegiatan investasi. Di dalam melaksanakan ini pemerintah menggunakan strategi seperti dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun dan disesuaikan dengan tahap pembangunan. Dengan selalu terbatasnya dana pembangunan dibandingkan dengan kebutuhan investasi, maka harus diadakan penentuan prioritas investasi. (Noor, 2002)

Pengeluaran pembangunan yang ditujukan untuk membangun sarana fisik dan infrastruktur lainnya, tidak lain merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah yang dapat mendorong bagi berkembangnya kegiatan investasi masyarakat. Dengan demikian melalui pengeluaran pembangunan maka secara langsung akan mendorong kegiatan investasi dalam perekonomian yang juga melibatkan kegiatan konsumsi atas berbagai produk yang dibutuhkan dalam kegiatan investasi tersebut. Hal ini sesuai dengan pandangan Keynes yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh yang positif terhadap produksi.

Sesuai dengan argumentasi Keynes mengenai pengeluaran pemerintah bahwa pengeluaran pemerintah diperlukan untuk mempengaruhi permintaan agregat melalui kebijaksanaan fiskal yang bersifat ekspansif dan kontraktif pada kondisi perekonomian. Pengeluaran pemerintah yang terutama terdiri dari pengeluaran konsumsi dan investasi dibiayai dari berbagai sumber, dalam hal ini sumber terbesar diharapkan berasal dari pajak. Pengeluaran pemerintah serta pembiayaannya menimbulkan berbagai efek terhadap kegiatan ekonomi bagi pelaku ekonomi dalam masyarakat melalui efek multiplier. (Astuty, 2006)

Menurut Samuelson (1994) bahwa belanja negara atau pengeluaran pemerintah adalah seluruh pembelian atau pembayaran barang dan jasa untuk kepentingan nasional misalnya pembelian persenjataan, pembangunan jalan bendungan dan gaji pegawai negeri. Pengeluaran pemerintah merupakan penentu pokok jumlah pengeluaran agregat, sehingga juga merupakan penentu tingkat GNP.

Menurut Wagner (Goode, 1990) bahwa kegiatan dan pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat merupakan sosok negara maju, demikian pula kegiatan pemerintah pada berbagai tingkat (di Indonesia pusat, propinsi, kabupaten dan kecamatan) meningkat secara intensif dan ekstensif. Ada beberapa faktor sebagai penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah antara lain substitusi antara kegiatan swasta dan kegiatan pemerintah.

Menurut Lyn (1982), pengeluaran di negara-negara sedang berkembang yang ditentukan oleh penerimaannya, baik penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak. Ketidakstabilan penerimaan pemerintah mempunyai hubungan yang positif dengan ketidakstabilan. Ketidakstabilan tersebut akan menambah kompleksitas manajemen fiskal dan menyebabkan perencanaan pembangunan menjadi tidak efektif. Hal ini akan mengurangi kepercayaan dunia usaha dan menyebabkan tingkat investasi menurun, dan pada akhirnya dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

Kebutuhan pengaturan dan perlindungan oleh pemerintah yang semakin meningkat akibat semakin kompleksnya hubungan hukum dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pembagian kerja dan industrialisasi, urbanisasi dan peningkatan pengeluaran untuk kesejahteraan anggota masyarakat terutama yang berhubungan dengan retribusi pendapatan. Selain itu, perubahan teknologi yang tidak dapat dihindari dari peningkatan

skala investasi dalam berbagai kegiatan ekonomi swasta yang menimbulkan monopoli sehingga memerlukan intervensi pemerintah demi efisiensi ekonomi.

Menurut aliran Keynes bahwa pemerintah dapat merangsang perekonomian dengan melakukan langkah kebijakan moneter dan fiskal untuk merubah permintaan agregat. Kebijakan itu meningkatkan permintaan agregat dalam aktivitas perekonomian yang lambat. Pengeluaran pemerintah yang crowds out tidak terjadi karena peningkatan pengeluaran pemerintah meningkatkan output dan merangsang investasi lebih banyak dan bukan mendesak keluar pembentukan modal (Astuty, 2006)

Alasan lain timbulnya intervensi pemerintah adalah terjadinya *increasing return to scale* dalam sejumlah komoditas. Industri-industri yang beroperasi dalam kondisi *increasing return to scale* menimbulkan *natural monopolies* karena kebutuhan *capital equipment* yang besar untuk melayani sejumlah konsumen sehingga memungkinkan hanya satu perusahaan dalam industri. Natural monopolis banyak ditemukan pada *public utilities* seperti listrik, air minum, telekomunikasi dan sebagainya. Increasing return to scale dalam produksi menunjukkan *decreasing average cost* dan *marginal cost* terletak di bawah *average cost*. Dalam pasar output yang kompetitif, efisiensi mensyaratkan harga sama dengan marginal cost, sehingga perusahaan memperoleh profit. Namun jika terjadi increasing return to scale dalam produksi, syarat ini sukar dipenuhi karena cost per unit lebih tinggi daripada revenue per unit. Tidak ada perusahaan yang akan beroperasi dalam kondisi ini karena akan menderita kerugian. Dalam kondisi ini intervensi pemerintah diperlukan untuk menjaga stabilisasi, khususnya dalam perekonomian. (Fisher, 1986)

2.1. Kebijakan Fiskal

2.1.1. Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijaksanaan fiskal memegang peranan yang penting dalam pembentukan kebijakan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka untuk membelanjakan uangnya guna mencapai tujuan negara dan upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. (Syamsi, 1983)

2.1.2 Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijaksanaan fiskal mempunyai tiga tujuan utama, yaitu (1) untuk menjamin bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya menyamai laju pertumbuhan potensial dengan mempertahankan kesempatan kerja penuh (2) untuk mencapai suatu tingkat harga umum stabil yang wajar dan (3) untuk meningkatkan laju pertumbuhan potensial tanpa merintangai tujuan-tujuan lain dari masyarakat yang hendak dicapai (Due, 1985)

Kebijaksanaan fiskal sebagai sarana untuk menggalakkan pembangunan ekonomi mempunyai beberapa tujuan antara lain seperti yang disebutkan di bawah ini (Noor, 2002) :

Pertama, untuk meningkatkan laju investasi, kebijaksanaan fiskal bertujuan untuk meningkatkan dan memacu laju investasi sektor swasta dan sektor pemerintah. Dalam rangka meningkatkan laju investasi, pemerintah harus menerapkan investasi berencana di sektor publik. Tindakan diharapkan diikuti oleh investasi di sektor swasta. Di samping itu harus didorong arus investasi ke jalur-jalur yang penting bagi keperluan masyarakat,

yaitu investasi di bidang "*Social Overhead*" seperti transportasi, perhubungan, pengembangan tenaga kerja, pendidikan dan lain-lain.

Investasi di bidang "*Social Overhead*" diharapkan menghasilkan eksternal ekonomi yang cenderung memperluas pasar, meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Penciptaan modal *overhead* diharapkan pula meningkatkan "*marginal productivity*" investasi swasta ini berarti akan mendorong investasi swasta ke jalur yang produktif.

Kedua, untuk meningkatkan kesempatan kerja, kebijaksanaan fiskal harus diarahkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Untuk itu, pengeluaran pemerintah harus diarahkan kepada penyediaan prasarana sosial dan ekonomi, sehingga akan menciptakan kesempatan kerja dan menaikkan efisiensi produktivitas perekonomian jangka panjang.

Ketiga, untuk meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakstabilan ekonomi internasional, kebijaksanaan fiskal harus mampu meningkatkan usaha mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi fluktuasi siklus internasional yang pendek, terutama negara-negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, di mana gejolak ekonomi dalam negeri sangat peka terhadap gejolak ekonomi internasional.

Keempat, untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Kebijaksanaan fiskal harus dapat meningkatkan pendapatan nasional dan mendistribusikan kembali sehingga ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat akan menimbulkan perpecahan sosial yang pada gilirannya menghambat pembangunan ekonomi.

Keberhasilan kebijaksanaan fiskal di dalam mencapai tujuan-tujuan di atas, tergantung kepada jumlah penerimaan negara yang dapat ditingkatkan serta jumlah dan arah pengeluaran negara.

Kebijaksanaan fiskal merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pengeluaran dan pendapatan uang bertujuan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, mengatur distribusi pendapatan dan kekayaan serta mempertahankan kesempatan kerja penuh. Berbicara mengenai kebijaksanaan fiskal di Indonesia, biasanya berhubungan dengan masalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Penerimaan pemerintah terdiri dari penerimaan pajak, non pajak dan pinjaman dari luar negeri. Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang terutama bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata.

Khusus bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, kegiatan pemerintah pada umumnya selalu meningkat. Pengeluaran pemerintah praktis dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi pada umumnya, bukan saja karena pengeluaran ini dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, tetapi juga merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat yang kemungkinannya akan mendorong produksi domestik. (Anwar, 1986). Semakin meningkatnya peranan pemerintah ini dalam proporsinya terhadap pendapatan nasional.

2.1.3. Instrumen Kebijakan Fiskal

Berbicara mengenai kebijaksanaan fiskal di Indonesia biasanya berhubungan dengan masalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Penerimaan pemerintah terdiri dari penerimaan pajak, non pajak dan penerimaan dan pinjaman luar negeri.

2.1.3.1 Pajak

Pajak merupakan instrumen yang paling efektif dari segala kebijaksanaan fiskal. Andreani mengartikan pajak sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah dengan paksaan yuridis untuk memperoleh alat-alat guna membiayai pengeluaran pemerintah, tanpa memberi sesuatu timbal balik terhadap pungutan tersebut. (Prawiramidjoyo, 1980).

Fungsi pajak yaitu : *Pertama*, untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber konsumsi ke investasi.

Kedua, untuk meningkatkan dorongan menabung dan menanam modal. Pajak tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan penerimaan yang lebih besar, tetapi juga berperan sebagai perangsang untuk menabung dan melakukan investasi konsesi fiskal seperti kelonggaran investasi, tax holiday, potongan pajak harus juga diberikan sebagai pendorong investasi.

Ketiga, untuk mentransfer sumber dana dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah, sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah. Pajak merupakan cara yang paling efisien untuk mentransfer dana kepada pemerintah agar digunakan lebih produktif. Dengan menggunakan pajak pada pendapatan, tanah, laba, kekayaan, pemerintah dapat menyedot pendapatan ke kas negara untuk dipergunakan lebih tepat melalui investasi pemerintah yang lebih produktif. Jadi perpajakan membantu

mengalihkan sumber dari saluran tidak produktif ke saluran produktif melalui investasi pemerintah.

Keempat, untuk memodifikasi pola investasi, perpajakan harus memperbaiki pola investasi di dalam perekonomian. Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa salah satu fungsi perpajakan di negara-negara terbelakang adalah untuk mentransfer sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Tetapi tidak berarti bahwa perpajakan dimaksudkan untuk mengganti investasi swasta. Malahan, perpajakan justru harus mendorong dan mengarahkan kembali investasi swasta ke jalur yang lebih produktif.

Kelima, untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Salah satu tujuan penting perpajakan adalah mengurangi perbedaan pendapatan dan kemakmuran. Untuk mengurangi pemusatan kemakmuran pada beberapa segelintir kelompok masyarakat dan ketimpangan kemakmuran, maka dianjurkan pajak progresif atas warisan dan kekayaan.

Keenam, untuk memobilisasi surplus ekonomi, perpajakan harus memobilisasi surplus ekonomi untuk pembangunan dan terus menerus memperbesar surplus tersebut. Upaya untuk memobilisasi surplus tersebut dapat dilakukan melalui pajak bumi, pajak pendapatan pertanian dan beban khusus. Seperti dana-dana perbaikan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan seperti pekerjaan irigasi, sistem pengendalian banjir dan jasa perbaikan pertanian.

2.1.3.2 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang terutama bertujuan untuk meningkatkan laju inflasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata.

Prinsip anggaran dinamis yang dianut dalam APBN tidak lain adalah peningkatan jumlah tabungan pemerintah dari tahun ke tahun sehingga kemampuan untuk menggali sumber dana dalam negeri bagi pembiayaan pembangunan dapat tercapai. Prinsip anggaran yang dinamis dalam hal ini dapat juga diartikan secara absolut yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah tabungan pemerintah (surplus dalam belanja rutin), sehingga kemampuan untuk menyediakan dana untuk belanja pembangunan yang terus menurun dapat ditingkatkan. Secara relatif, diartikan sebagai persentase ketergantungan pembiayaan terhadap bantuan/pinjaman luar negeri yang semakin mengecil.

3. Tingkat Suku Bunga

Dalam mengoptimalkan kinerja perbankan di Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan Deregulasi Perbankan 27 Oktober 1988 (Pakto '88) perihal memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan bank-bank baru dan bank-bank yang sudah ada dibebaskan menentukan cabangnya masing-masing, menurunkan *cash ratio* dari 15% menjadi 2% yang merupakan cadangan wajib bank-bank umum yang harus disimpan pada Bank Sentral. Kebijaksanaan ini dimaksudkan untuk memenuhi permintaan likuiditas masyarakat.

Dengan adanya Paket Deregulasi ini (pakto 1988), maka secara otomatis akan memberikan kemungkinan bank-bank baru saling bersaing dalam menarik nasabah. Kondisi ini akan melibatkan setiap bank bersaing dalam menentukan tingkat bunga, baik itu tingkat bunga untuk tabungan, maupun tingkat bunga dalam hal pemberian kredit.

Tinggi rendahnya suku bunga untuk bermacam jenis kredit tersebut, ikut mempengaruhi keputusan para pengusaha untuk meminta kredit bank. Tinggi rendahnya

suku bunga deposito juga ikut mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Kedua hal ini bersama-sama mempengaruhi jumlah uang beredar, dan juga besarnya jumlah kredit yang diberikan oleh perbankan.

3.1. *Pengertian Tingkat Suku Bunga*

Pada prinsipnya "tingkat bunga adalah harga atas penggunaan uang atau sebagai sewa atas penggunaan uang dalam jangka waktu tertentu". Harga atas penggunaan uang biasanya dinyatakan dalam persen (%) dalam jangka waktu tertentu (misal 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun), harga penggunaan uang per unit disebut tingkat bunga (Boediono, 1985), sedangkan menurut ahli ekonomi Klasik "Tingkat bunga adalah "harga" dari (penggunaan) *loanable funds* atau istilah tersebut biasa diartikan sebagai "dana yang tersedia untuk dipergunakan", atau "dana investasi", sebab menurut teori Klasik bunga adalah "harga" yang terjadi di "pasar dana investasi". (Boediono, 1985).

Berdasarkan dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa jumlah uang beredar atau penawaran uang merupakan hasil netto dari perilaku pemerintah (bank sentral, bank-bank umum dan masyarakat pada umumnya dan khususnya nasabah bank-bank).

3.2. *Jenis-Jenis Suku Bunga*

Dalam realitas sehari-hari terdapat empat macam suku bunga yaitu : (Boediono, 1985).

1. *Suku bunga dasar (bank rate)*, yaitu suku bunga yang ditentukan oleh bank sentral atas kredit yang diberikannya kepada perbankan dan tingkat suku bunga yang ditetapkan bank sentral untuk mendiskonto surat-surat berharga yang ditarik atau dikontrol oleh bank sentral.

2. *Suku bunga nominal (nominal rate)*, yaitu suku bunga yang ditentukan berdasarkan jangka waktu satu tahun. *Suku bunga efektif (effective rate)*, yaitu suku bunga yang sesungguhnya dibebankan kepada debitur dalam jangka waktu satu tahun apabila suku bunga nominal akan sama dengan nilai suku bunga efektif.
3. *Suku bunga padanan (equivalent rate)*, yaitu suku bunga yang besarnya dihitung setiap hari (bunga harian), setiap minggu (bunga mingguan), setiap bulan (bunga bulanan) atau setiap tahun (bunga tahunan) untuk sejumlah pinjaman (kredit) atau investasi selama jangka waktu tertentu, yang apabila dihitung secara anuitas (bunga berbunga) akan memberikan penghasilan bunga dengan jumlah yang sama.

Tingkat suku bunga dalam teori klasik yang beranjak dari teori makro merupakan nilai balas jasa dari modal menurut teori Klasik, bahwa tabungan masyarakat adalah fungsi dari tingkat suku bunga. Investasi juga merupakan fungsi dari tingkat suku bunga, makin tinggi tingkat suku bunga, maka keinginan masyarakat melakukan investasi semakin kecil. Hal ini karena biaya penggunaan dana (*Cost of Capital*) menjadi semakin mahal, sebaliknya makin rendah tingkat suku bunga maka keinginan masyarakat untuk melakukan investasi akan semakin meningkat. (Nasution, 1991).

Dalam teori Keynes tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara sektor riil. Teori Keynes membedakan permintaan akan uang menurut motivasi masyarakat untuk menahan uangnya. Dia membagi tiga motivasi orang untuk menahan uang yaitu (Nasution, 1991):

1. Permintaan uang untuk tujuan transaksi (*Transaction Motive*)

Yaitu motif memegang uang untuk keperluan transaksi sehari-hari. Besarnya uang untuk keperluan ini tergantung kepada besarnya pendapatan.

$$M_t = f(Y)$$

Dimana;

M_t = Permintaan uang untuk keperluan transaksi

Y = Pendapatan nasional

2. Permintaan uang untuk berjaga-jaga (*Precautionary Motive*)

Yaitu motif memegang uang karena adanya ketidakpastian mengenai masa datang. Motif transaksi dan berjaga-jaga merupakan fungsi positif dari tingkat pendapatan. Hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

$$M_p = f(Y)$$

Dimana;

M_p = Permintaan uang untuk berjaga-jaga

3. Permintaan uang untuk tujuan spekulasi (*Speculatif Motive*)

Yaitu motif memegang uang untuk keperluan spekulasi dan mencari keuntungan sebagaimana motif berjaga-jaga, motif permintaan uang untuk spekulasi ini timbul akibat ketidakpastian di masa yang akan datang. Keynes mengatakan bahwa motif ini berdasarkan kepada keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Besarnya uang untuk keperluan kepada besarnya tingkat bunga;

$$M_s = f(i)$$

4. Investasi

Tugas utama pemerintah adalah melakukan stabilitas ekonomi makro, dalam pengertian inflasi rendah, rupiah menguat, dan suku bunga rendah. Jika stabilitas ekonomi makro ini baik, ditambah dengan kepastian hukum dan jaminan keamanan yang memadai, maka investasi akan datang dengan sendirinya, tanpa harus ada program khusus. Bagi investasi dalam negeri, restrukturisasi perbankan dan utang menjadi penentu, karena kembalinya peranan perbankan dalam menyalurkan kredit dan penyelesaian permasalahan utang korporat akan mendorong kegiatan investasi dalam negeri (Bappenas, 2005). Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi panjang.

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi tentulah membutuhkan modal yang sangat besar dan pembentukan modal tersebut dianggap sebagai kunci ke arah keberhasilan pembangunan. Modal yang besar untuk melaksanakan pembangunan, dapat diperoleh dari Pembentukan atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Sumber-sumber domestik yang dapat dikerahkan untuk pembentukan modal dalam negeri (PMDN) ialah: kenaikan pendapatan nasional, pengurangan konsumsi, penggalakan tabungan, pendirian lembaga keuangan, menggerakkan simpanan emas, meningkatkan keuntungan, langkah-langkah fiskal dan moneter dan sebagainya. Namun

sumber domestik yang paling efektif yaitu tabungan. Tabungan pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam pembentukan modal.

Dalam pelaksanaan pembangunan modal yang diperoleh dari sumber-sumber domestik kadang-kadang tidak mencukupi bagi suatu negara seperti Indonesia, sehingga diperlukan sumber eksternal berupa modal asing. Penanaman Modal Asing (PMA) membantu dalam mencukupi PMDN. PMA sebaiknya hanya bersifat sebagai perangsang dan membantu kekuatan nasional.

4.1. *Pengertian Investasi*

Penanaman modal (investasi) dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa akan datang. (Sukirno, 1994)

4.2. *Teori Investasi*

Dalam konsep pembangunan, investasi dipandang sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Untuk itu diperlukan kerja sama yang erat antara otoritas moneter dan pemerintah guna memecahkan kebuntuan dari masalah yang sedang terjadi. Disamping itu, memperbaiki iklim investasi dan menghilangkan risiko mikro struktural di sektor riil perlu segera diterapkan demi mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.

Akumulasi kapital adalah suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Maka dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Jadi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dengan melakukan penanam modal

(investasi), maka dapat meningkatkan pendapatan. Berikut ini akan beberapa teori mengenai investasi.

Menurut Smith, Investasi dilakukan karena para pemilik modal mengharapkan keuntungan, dan harapan masa depan keuntungan bergantung pada iklim investasi pada hari ini dan pada keuntungan nyata (Hakim, 2002)

A. Teori Neo Klasik

Menurut teori Neo Klasik, suatu investasi akan dijalankan apabila pendapatan lebih besar dari tingkat bunga, dan investasi dalam suatu barang modal adalah menguntungkan jika biaya sewa ditambah bunga lebih kecil daripada hasil pendapatan yang diharapkan dari investasi tersebut. Dengan demikian ada tiga unsur penting yang harus diperhitungkan dalam menentukan investasi, yaitu : 1). Tingkat biaya barang modal (2) Tingkat bunga, dan (3) Tingginya pendapatan yang akan diterima. Perubahan dari salah satu faktor tersebut akan mengakibatkan perubahan dalam perhitungan profitabilitas.

B. Teori Keynes

Masalah investasi, baik penentuan jumlah maupun kesempatan untuk melakukan investasi oleh Keynes didasarkan atas konsep Marginal Efficiency of Investment (MEI) lebih tinggi daripada tingkat bunga.

Menurut teori Klasik, investasi merupakan suatu pengeluaran yang dimaksudkan untuk meningkatkan potensi masyarakat untuk meningkatkan produksi. Jadi investasi merupakan pengeluaran yang akan menambah jumlah alat-alat produksi dalam masyarakat, dimana pada akhirnya akan menambah pendapatan, sehingga pertumbuhan ekonomi akan tercapai.

Investasi juga sebagai sarana atau motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi khususnya dalam upaya memperluas penggunaan tenaga kerja dan meningkatkan produksi (output)

4.3 Fungsi Investasi

Kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dengan tingkat pendapatan dinamakan fungsi investasi. Bentuk fungsi investasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Fungsi investasi yang sejajar dengan sumbu datar
2. Fungsi investasi yang naik ke kanan atas jika pendapatan meningkat

Fungsi investasi yang sejajar dengan sumbu datar dinamakan Investasi Otonom (*autonomous investment*). Sedangkan pengertian masing-masing investasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Investasi otonomi (*autonomous investment*), adalah investasi yang baru timbul karena hal-hal yang tidak tergantung pada perubahan tingkat suku bunga, tingkat konsumsi dan pendapatan. Investasi ini biasanya dilakukan oleh pemerintah, misalnya untuk pertahanan nasional dan pembangunan infrastruktur.
2. Investasi terpengaruh (*induced investment*), yaitu investasi yang bertambah apabila terjadi peningkatan dalam pengeluaran konsumsi atau mengkonsumsi pendapatan yang akan mengakibatkan konsumsi juga meningkat dan akhirnya meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Peningkatan permintaan efektif ini akan menyebabkan investasi meningkat.

4.4. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keputusan Investasi*

Ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah dalam memperbaiki peluang investasi yaitu: *Pertama*, memperluas pasar berbagai produk agar potensi keuntungan meningkat, dan *Kedua*, memudahkan proses produksi dengan cara membangun sarana dan prasarana (jaringan listrik, jalan, dan sebagainya) serta pogram-program pendukung proses produksi berupa subsidi, tarif, pinjaman, program-program pelatihan pelatihan, serta bantuan teknis dan manajerial. (Hakim, 2002)

Sebagian besar investasi-investasi yang dilakukan oleh para investor adalah untuk memperoleh keuntungan. Untuk menentukan apakah mereka yang akan mengeluarkan modal atau tidak, mereka mengajukan pertanyaan : Apakah pembelian barang modal ini akan menambah penghasilan, paling tidak sebanyak ongkosnya ?". Ini berlaku baik untuk pembelian barang atau penggantian, maupun untuk menambah netto modal. Oleh karena itu, keputusan-keputusan mengenai jumlah investasi baru itu tergantung dari perbandingan antara biaya bunga dengan perkiraan hasil tahunan dari investasi baru tersebut. (Chandler, 1989).

Di samping faktor biaya modal berupa tingkat bunga dan keuntungan yang diharapkan dari investasi, adapula faktor lain yang turut mempengaruhi keputusan seorang investor untuk melakukan investasi antara lain pajak, perkembangan teknologi, pertumbuhan penduduk, akumulasi modal serta perkiraan dan harapan (*expectation*) tentang situasi ekonomi di masa depan.

Menurut Sukirno, (1994), secara umum makin rendah tingkat bunga yang akan dibayar para pengusaha semakin banyak usaha yang dapat dilakukan. Tingkat suku bunga merupakan variabel penting dalam suatu perekonomian, karena merupakan faktor

penentu investasi dan permintaan agregat. Apabila tingkat suku bunga rendah, volume investasi adalah tinggi, sedangkan apabila tingkat suku bunga tinggi, maka permintaan akan uang mengadakan investasi rendah. Hal ini disebabkan karena apabila tingkat bunga rendah, maka permintaan akan uang untuk mengadakan investasi adalah tinggi dari jumlah uang beredar (M_s) bertambah. Bila tingkat bunga tinggi, maka masyarakat lebih cenderung untuk menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan dan jumlah uang yang beredar akan berkurang.

Faktor utama lainnya yang sangat mempengaruhi investasi adalah keuntungan yang diharapkan dari pengeluaran modal tersebut, yang biasa disebut Efisiensi Investasi (*Marginal Efficiency of Investment*)/MEI. Kurva MEI adalah kurva yang mencerminkan skedul permintaan akan investasi yang relevan untuk seluruh perekonomian dengan slope yang negatif. Dengan demikian tingkat investasi dapat dianggap sebagai fungsi menurun dari tingkat bunga, dan dengan alasan inilah sehingga para ahli ekonomis menulis fungsi permintaan akan investasi sebagai berikut : $I = f(i)$.

Sedangkan menurut Sukirno (1994), bahwa investasi terutama ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Ramalan mengenai keadaan di masa akan datang
2. Tingkat bunga
3. Perubahan di dalam perkembangan teknologi. Makin banyak perkembangan teknologi yang akan dibuat, makin banyak pula kegiatan pembaharuan yang akan dilakukan, makin tinggi tingkat investasi yang akan dicapai.

4. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya. Investasi cenderung untuk mencapai tingkat yang lebih besar apabila pendapatan nasional semakin besar jumlahnya begitu pula sebaliknya.
5. Keuntungan yang diharapkan perusahaan-perusahaan.

5. Ekspor

Pengembangan ekspor, terutama ekspor non migas, baik barang maupun jasa pada dasarnya merupakan andalan dalam jangka pendek bagi pemulihan ekonomi dan jangka menengah untuk terus meningkatkan perekonomian nasional sekaligus cadangan devisa. Ekspor yang terus meningkat juga merupakan indikator penting dari meningkatnya daya saing.

Perdagangan internasional sering disebut sebagai motor pertumbuhan ekonomi yang menggerakkan pembangunan ekonomi negara-negara maju. Perdagangan internasional menjanjikan banyak keuntungan, dalam rangka meningkatkan standar hidup penduduk. Mereka mengimpor dan mengekspor berbagai barang dan jasa serta modal. Mereka memberi atau menerima pinjaman luar negeri serta mengadaptasi teknologi dari luar negeri dan menjual produk-produk baru ke manca negara. Tidak dapat disangkal lagi, peradaban manusia semakin berkembang kebutuhan semakin dan beraneka ragam. Dalam abad modern seperti sekarang ini sangat sukar rasanya untuk memenuhi dan menghasilkan sendiri seluruh barang kebutuhan, tanpa mengharapkan bantuan pihak lain, sekalipun itu suatu negara. Tanpa bantuan negara lain maka tidak akan mampu memenuhi segala barang kebutuhannya untuk itu suatu negara akan minta bantuan negara lain atas keinginan suatu yang tidak dihasilkan atau jika dihasilkan tidak menguntungkan negara yang bersangkutan.

Dalam teori ilmu perdagangan internasional, manfaat perdagangan (*gains from trade*) dipilih menjadi dua, yaitu manfaat perdagangan langsung (*manfaat statis*) dan manfaat tidak langsung (*manfaat dinamis*). Asumsikan sebuah negara mempunyai faktor produksi tertentu dan perekonomian berada dalam kesempatan kerja penuh. Teori perdagangan internasional memperlihatkan bahwa dengan mengalokasikan faktor produksi untuk memproduksi barang di mana suatu negara mempunyai keunggulan komparatif, dengan kata lain melakukan spesialisasi, perdagangan internasional memungkinkan negara tersebut untuk mengkonsumsi total barang lebih banyak daripada yang bisa diproduksi. Dengan kata lain, batas kemungkinan konsumsinya akan berada di luar batas kemungkinan produksinya. Inilah yang disebut dengan (*manfaat statis*) perdagangan internasional. Teori spesialisasi ini didasarkan pada teori keunggulan komparatif, pertama kali dikemukakan oleh David Ricardo (1772-1823), yang telah menjadi teori standar perdagangan internasional. (Hakim, 2002)

Pola-pola perdagangan dunia yang terjadi mencerminkan perpaduan dari kedua motif ini. Penjelasan teoritis dari kedua motif di atas dapat diperoleh dari teori perdagangan baik yang konvensional maupun modern, diantaranya: teori keunggulan yang telah dikembangkan oleh David Ricardo dan teori proporsi faktor oleh Heckscher-Ohlin.

Teori keunggulan komparatif pertama kali diperkenalkan oleh David Ricardo yang dikenal dengan "law of comparative advantage" yang pada prinsipnya menyatakan bahwa suatu negara mengkonsentrasikan diri pada produksi dan ekspor barang yang secara relatif atau memiliki biaya komparatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain.

Hecksher Ohlin lebih menekankan pada proporsi faktor yang dimiliki oleh suatu negara sebagai titik tolak terjadinya perdagangan. Model ini mengemukakan, setiap negara hendaknya melakukan spesialisasi dan mengekspor barang-barang sesuai dengan kelimpahan faktor tenaga kerja hendaknya melakukan spesialisasi dan mengekspor barang-barang yang diproduksinya bersifat padat karya (labor intensif), sementara itu negara-negara yang telah memiliki kelimpahan faktor modal hendaknya memproduksi dan mengekspor barang-barang yang diproduksinya bersifat padat modal (capital intensive)

Suatu negara yang memiliki tenaga kerja relatif banyak dan faktor produksi lain relative sedikit, sehingga upah tenaga kerja rendah, sedang harga faktor produksinya ke arah barang-barang yang padat karya (cenderung untuk melakukan spesialisasi dalam produksi barang-barang yang padat karya). Negara tersebut akan mengekspor barang-barang yang relatif padat karya dan mengimpor barang-barang yang relatif padat modal. Akibatnya jumlah tenaga kerja yang diminta akan naik dan jika seluruh tenaga kerja yang ingin bekerja sudah dimanfaatkannya semuanya sudah pasti akan naik, dan sebaliknya dengan harga faktor produksi lainnya. Demikian pula halnya di negara yang memiliki banyak faktor produksi modal yang relatif lebih tinggi, sedangkan faktor produksi tenaga kerja relatif sedikit. Dengan adanya perdagangan internasional antara kedua negara tersebut akan mengakibatkan harga faktor-faktor produksi homogen menjadi sama.

Perkembangan model perdagangan menghasilkan model The Heckser-Ohlin Samuelson dengan beberapa dalil sebagai berikut:

1. Suatu negara mempunyai komparatif pada barang yang diproduksinya dengan menggunakan faktor produksi yang persediaanya relatif lebih banyak (*The H-O- Theorem*)
2. Perdagangan international bebas antara dua negara akan menyebabkan harga faktor-faktor produksi negara-negara tersebut cenderung menjadi sama. Keseimbangan international menghasilkan harga faktor akan menjadi sama (*The Price Equalization Theorem*)
3. Proteksi dalam bentuk tarif akan meningkatkan pendapatan riil dari faktor-faktor produksi langka yang dimiliki suatu negara (*The Stolper-Samuelson Theorem*)
4. Pada tingkat harga-harga komoditi yang relatif konstan, pertumbuhan dari hanya satu faktor akan mengakibatkan peningkatan output komoditi yang secara intensif telah menggunakan faktor tersebut dan dapat mengakibatkan pengurangan output komoditi yang menggunakan faktor lainnya (*The Rybezski Theorem*)

Model Heckscher Ohlin lebih menekankan kepada proporsi faktor -faktor yang dimiliki oleh suatu negara sebagai titik tolak terjadinya perdagangan. Model ini mengemukakan bahwa setiap negara hendaknya akan melakukan spesialisasi dan mengekspor barang-barang sesuai dengan kelimpahan faktor tenaga kerja hendaknya melakukan spesialisasi dan mengekspor barang-barang yang diproduksinya bersifat padat karya (labor intensif), sementara itu negara-negara yang telah memiliki kelimpahan faktor modal hendaknya memproduksi dan mengekspor barang-barang yang diproduksinya bersifat padat modal (capital intensive)

Banyak faktor yang mempengaruhi penampilan ekspor faktor ini adalah harga international komoditi tersebut, nilai tukar uang (exchange rate), kuota dan tarif serta non

tarif. Makin besar selisih antar harga di pasar internasional dengan harga domestik akan menyebabkan jumlah komoditi yang akan diekspor menjadi bertambah banyak. Kebijakan nilai tukar uang adalah dimaksudkan untuk memperbaiki neraca pembayaran yang defisit melalui peningkatan ekspor dengan efek adanya kebijakan devaluasi terhadap ekspor-impor suatu negara yang dipengaruhi oleh elastisitas harga untuk impor dan daya saing komoditi tersebut di pasaran international.

Volume ekspor dunia diperkirakan berpengaruh negatif terhadap harga dunia, sedangkan volume impor dunia, harga komoditi substitusi dan harga internasional lainnya diperkirakan berpengaruh positif. Kenaikan ekspor dunia berpengaruh negatif karena kenaikan tersebut mengakibatkan adanya kelebihan (excess) penawaran sehingga harga turun. Sebaliknya, kenaikan impor dunia berpengaruh positif karena kenaikan tersebut mengakibatkan terjadinya excess permintaan sehingga harga naik.

6. Beberapa Kajian Empiris

6.1. Pengeluaran pembangunan dan investasi serta pertumbuhan ekonomi

Menurut Sadli (2005) bahwa ada beberapa fundamental ekonomi yang dapat mempengaruhi tercapainya pertumbuhan ekonomi yaitu: pertama, pengeluaran pemerintah di bidang infrastruktur agar tidak terjadi masalah ekonomi biaya tinggi dan kedua, intermediasi sistim perbankan belum bisa bekerja secara normal, karena ketatnya prudential rules yang baru dan dan masih ada trauma kredit macet

Terjadinya ekonomi biaya tinggi menyebabkan perekonomian kita berproduksi secara sub-optimal, menghambat kemampuan pasar untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mengurangi akses yang seharusnya terbuka untuk partisipasi yang lebih luas yang pada akhirnya memperlebar disparitas pendapatan, pengangguran dan

ekonomi biaya tinggi dalam perekonomian kita. Kita harus segera memperbaiki keadaan ini dengan membuka akses dan partisipasi masyarakat yang lebih luas, melalui perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana, penyederhanaan perizinan dan berbagai kemudahan lainnya. (Abdullah, 2007)

Berkaitan dengan masalah tersebut, isu empiris maupun teoritis menarik yang perlu diamati adalah bagaimana menentukan peranan pemerintah yang optimal dalam perekonomian. Secara teoritis Ram (1986), mengungkapkan bahwa dalam hal penentuan besarnya peranan sektor pemerintah dan sektor swasta terdapat dua kelompok teori yang memberikan tanggapan kontradiktif. Secara teoritis menurut salah satu pendapat ekstrem menyatakan bahwa peranan sektor pemerintah yang lebih besar dapat mengganggu efisiensi dan pertumbuhan ekonomi karena :

1. Operasi pemerintah sering dikelola secara tidak efisien
2. Proses pengaturan (regulasi) menimbulkan beban dan biaya terhadap sistem ekonomi secara keseluruhan.
3. Kebijakan fiskal dan moneter cenderung menimbulkan penyimpangan dengan mengganggu insentif ekonomi dan menurunkan produktivitas ekonomi.

Sebaliknya, suatu pandangan ekstrem yang lain dikemukakan oleh Landau (1983) bahwa sektor pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam proses pembangunan, dengan menganggap bahwa peranan pemerintah yang besar akan menjadi mesin pendorong bagi pertumbuhan ekonomi (engine of growth). Dasar pemikiran untuk ini antara lain :

1. Peranan pemerintah dalam menyelaraskan perbedaan antara kepentingan swasta dan kepentingan sosial.
2. Mencegah eksploitasi pihak luar negeri terhadap negara
3. Menjaga dan meningkatkan produktivitas investasi dan menetapkan target pertumbuhan dan pembangunan optimal yang dapat diterima masyarakat.

Menurut Tadjuddin Parenta (2007) bahwa pengeluaran pemerintah baik pengeluaran konsumsi maupun pengeluaran investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta di Asia Tenggara khususnya di negara Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand.

Sama halnya dengan Haziarah (2004) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toli-toli, kemudian Joniansyah (2003) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB, ini didukung oleh Nurwarka (2004) yang menemukan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap PDRB Kabupaten Selayar. Sedangkan temuan Noor (2002) bahwa APBD terutama pengeluaran sektor perhubungan dan perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah).

6.2. Tingkat Suku Bunga, Investasi Swasta, Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut ahli ekonomi Klasik tingkat bunga adalah harga atas penggunaan dana yang diperoleh dari kredit perbankan (Boediono, 1985). Kaum Klasik juga mengatakan bahwa dengan tabungan masyarakat (deposito) bukan berarti hilangnya dana dari peredaran, tetapi dipergunakan oleh para pengusaha untuk membiayai investasinya.

Selanjutnya dengan investasi ini penabung mendapatkan bunga, sedang pengusaha membayar bunga atas pinjaman, selama keuntungan yang diharapkan lebih besar dari bunga yang dibayarnya. Dengan adanya tabungan yang sama dengan investasi ($S=I$) menunjukkan bahwa kenaikan tabungan akan menaikkan jumlah investasi, karena bekerjanya mekanisme tingkat bunga, dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan uang.

Suku bunga merupakan suatu sasaran kebijaksanaan moneter yang sangat besar pengaruhnya karena suku bunga memegang peranan penting di dalam kegiatan perekonomian, sehingga beberapa pendapat dikemukakan oleh para ahli tentang suku bunga. Menurut Samuelson (1994) bahwa suku bunga adalah harga yang harus dibayar bank atau peminjam lainnya untuk memanfaatkan uang selama jangka waktu tertentu. Menurut teori Neo Klasik, suatu investasi akan dijalankan apabila pendapatan lebih besar dari tingkat bunga, dan investasi suatu barang modal adalah menguntungkan jika biaya sewa ditambah bunga lebih kecil daripada hasil pendapatan yang diharapkan dari investasi tersebut.

Dalam teori Fisher mengenai Loanable funds theory, bahwa tingkat suku bunga umum ditentukan oleh interaksi kompleks dari dua faktor yang pertama adalah total permintaan dana oleh perusahaan-perusahaan, pemerintah dan rumah tangga (atau individu-individu). Untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi dengan dana tersebut. Permintaan ini berhubungan negatif dengan suku bunga (kecuali permintaan pemerintah, yang seringkali tidak tergantung pada tingkat bunga). Jika penghasilan dan variabel-variabel lain tidak berubah, maka peningkatan suku bunga akan mengurangi permintaan pinjaman oleh perusahaan dan individu, karena proyek-proyek menjadi semakin tidak menguntungkan. Selain itu konsumsi dan pemilikan kas menjadi lebih mahal. Faktor

kedua yang mempengaruhi tingkat bunga adalah total penawaran dana dari perusahaan-perusahaan pemerintah dan individu-individu. Penawaran berhubungan positif dengan suku bunga, jika semua faktor ekonomi yang lain konstan. Jika suku bunga meningkat, perusahaan-perusahaan dan individu akan menabung dan meminjam lebih banyak.

Jumlah maksimum yang akan diinvestasikan perusahaan tergantung pada suku bunga, yaitu biaya dari pinjaman, perusahaan hanya akan berinvestasi sepanjang *marginal productivity of capital* melebihi atau sama dengan suku bunga. Dengan kata lain, perusahaan hanya akan menerima proyek-proyek yang memberikan keuntungan tidak lebih kecil dari biaya dana yang dipinjamnya. Jadi permintaan perusahaan terhadap pinjaman berhubungan negatif. Pada suku bunga yang rendah, lebih banyak proyek yang menawarkan laba dan perusahaan mau meminjam lebih banyak. Tingkat suku bunga dalam teori Klasik yang beranjak dari teori mikro merupakan nilai balas jasa dari modal menurut teori Klasik, bahwa tabungan masyarakat adalah fungsi dari suku bunga. Makin tinggi tingkat suku bunga makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Artinya pada tingkat suku bunga yang lebih tinggi masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungannya. Investasi juga merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Makin tinggi tingkat suku bunga, maka keinginan masyarakat untuk melakukan investasi semakin kecil. Hal ini karena penggunaan dana (*cost of capital*) menjadi semakin mahal. Sebaliknya makin rendah tingkat suku bunga maka keinginan untuk melakukan investasi akan meningkat. (Nasution, 1991)

Menurut Chandler (1989) keputusan-keputusan mengenai jumlah investasi baru tergantung dari perbandingan antara biaya bunga dengan perkiraan hasil tahunan dari

investasi baru tersebut. Secara umum makin rendah tingkat bunga yang akan dibayar para pengusaha semakin banyak usaha yang dapat dilakukan. (Sukirno, 1985).

Teori-teori ini didukung oleh penelitian Hamsinah (2006) yang menyatakan bahwa secara parsial tingkat bunga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi serta didukung oleh Djama'an (2006) yang melakukan penelitian tentang pengaruh kebijakan moneter dan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui ekspor dan investasi sektor perkebunan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan jumlah uang beredar, tingkat bunga, nilai tukar, dan pajak ekspor berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui ekspor dan investasi sektor perkebunan, sedangkan secara parsial tingkat bunga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam konsep pembangunan, investasi dipandang sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan kesempatan kerja terbuka luas. Karena itu, negara-negara berkembang berlomba-lomba untuk menarik investasi sebesar mungkin. (Juoro, 2007)

Menurut Malthus faktor-faktor ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan suatu negara adalah faktor akumulasi modal. Tanpa akumulasi modal yang diinvestasikan, proses produksi akan berhenti dan pertumbuhan ekonomi yang potensial akan berhenti. (Hakim, 2002)

Evsey D. Domar menekankan bahwa investasi sekarang mempunyai dua pengaruh. *Pertama*, investasi tersebut akan meningkatkan permintaan agregat saat ini, dan yang *kedua*, investasi tersebut akan meningkatkan kapasitas produksi. Jika kapasitas ini tidak dipergunakan dengan cukup (misalnya produsen tidak mau berinvestasi karena

menganggap permintaan tidak cukup, dan permintaan yang tidak cukup ini disebabkan oleh tingkat pertumbuhan yang tidak cukup), hal ini akan mengurangi investasi di masa yang akan datang, sehingga kapital yang menganggur menjadi berlebihan dan membuat perekonomian mengalami depresi. Akan tetapi jika investasi meningkat dalam tingkat yang tepat, permintaan agregat akan meningkat (sebagai hasil dari peningkatan pendapatan, dan peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh peningkatan investasi tersebut) dalam jumlah yang mencukupi untuk menyerap semua kapasitas produksi baru tersebut. (Hakim, 2002)

Hasil penelitian Noor (2002) menemukan bahwa investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD (pendapatan asli daerah) di Kota Samarinda. Hasil penelitian Noor ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Alam (2002) yang menemukan bahwa investasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian di Kota samarinda

Ekspor sangat penting dalam menunjang perekonomian Indonesia, karena ekspor tidak saja sebagai sumber penerimaan devisa tetapi juga sebagai perluasan pasar bagi produksi barang-barang domestik. (Muhammad, 2006)

Para ahli ekonomi klasik, khususnya Adam Smith dan John Stuart Mill, menganggap perdagangan internasional sebagai mesin pertumbuhan. Mill menulis pada pertengahan abad ke-19 yang menunjukkan bahwa pertumbuhan perdagangan internasional bisa membuat masyarakat mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh barang-barang yang sebelumnya tidak biasa diperoleh. Hal inilah yang sekarang disebut efek demonstrasi nasional. (Hakim, 2002).

Manfaat dari meningkatnya produktivitas dalam sektor ekspor dan sebagai akibatnya meningkatnya pendapatan riil yang kemudian akan menyebar ke seluruh perekonomian negara tersebut, menimbulkan kondisi yang disebut *export-led growth*, atau pertumbuhan yang disebabkan oleh hasil ekspor. Jika sebagai hasil dari perdagangan, pendapatan nasional meningkat sehingga tabungan meningkat, sehingga investasi produktif meningkat, dan kemudian pertumbuhan pendapatan nasional meningkat, maka pertumbuhan pendapatan nasional tersebut bisa dipandang sebagai manfaat dinamis yang lebih jauh dari perdagangan internasional. (Hakim, 2002). Kesimpulannya, perdagangan internasional bisa meningkatkan kesejahteraan dengan menggerakkan perekonomian sepanjang batas kemungkinan produksinya (manfaat statis), dan dengan menggerakkan batas kemungkinan produksi tersebut keluar (manfaat dinamis).

Pandangan optimis terhadap perdagangan internasional ini mendapat banyak kritikan. Sebagai contoh, Myrdal menyatakan bahwa perdagangan internasional telah menyebabkan kesenjangan pendapatan dunia yang semakin besar. Teori perdagangan hanya menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, barang dan jasa yang bisa dikonsumsi akan menjadi lebih besar jika negara tersebut berdagang satu dengan yang lain dibanding ketika mereka tidak berdagang. (Hakim, 2002)

Menurut David Richardo, ada dua alasan terjadinya perdagangan internasional: Pertama suatu negara berdagang karena mereka berbeda satu sama lain. Setiap negara dapat memperoleh keuntungan dengan melakukan suatu yang relatif lebih baik; kedua, suatu negara berdagang satu sama lain dengan tujuan mencapai skala ekonomis (*economies of scale*) dalam produksi, maksudnya, jika setiap negara hanya memproduksi

sejumlah barang tertentu mereka dapat menghasilkan barang-barang tersebut dengan skala yang lebih besar dan karenanya lebih efisiensi jika dibandingkan kalau negara tersebut memproduksi segala jenis barang. (Nopirin, 1996).

Ekspor menunjang perekonomian Indonesia, karena ekspor tidak saja sebagai sumber penerimaan devisa tetapi juga sebagai perluasan pasar bagi produksi barang-barang domestik dan penyerap tenaga kerja. Selain tingkat daya saing barang-barang ekspor itu sendiri, faktor penting lainnya yang mempengaruhi kinerja ekspor nasional adalah tingkat pertumbuhan perekonomian dunia, khususnya tingkat pertumbuhan ekonomi di negara mitra dagang Indonesia. (Hakim, 2002)

B. Keterkaitan antara Variabel - Variabel dalam Ekonomi

Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Stabilitas ekonomi makro dicapai ketika hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan (Bappenas, 2004).

Tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan dan disumbang oleh faktor konsumsi masyarakat, pengeluaran pemerintah, investasi, dan perdagangan luar negeri bersih yaitu ekspor setelah dikurangi impor. Konsumsi masyarakat yang merupakan faktor terbesar dalam pembentukan produksi nasional, mengalami tekanan. Faktor kenaikan harga sebagai akibat naiknya harga BBM yang tidak terelakkan telah mengurangi daya beli masyarakat. Dalam keadaan daya beli masyarakat yang masih lemah, sudah barang tentu masyarakat akan banyak menahan diri, dan hanya membeli barang atau jasa yang sangat dibutuhkan. Konsumsi masyarakat yang relatif cukup rendah ini tentu kurang mendorong angka pertumbuhan ekonomi (Dirjen Pajak, 2007)

Pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor non-migas. Peningkatan investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi yaitu dengan meningkatkan penyediaan infrastruktur menyederhanakan prosedur perijinan, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, menyederhanakan prosedur perpajakan dan kepabeanan, serta meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan

kredit kepada sektor usaha. Peranan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur akan makin ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian yang tidak stabil menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan masyarakat. Ketidakstabilan akan menyulitkan masyarakat, baik swasta maupun rumah tangga, untuk menyusun rencana ke depan, khususnya dalam jangka lebih panjang yang dibutuhkan bagi investasi. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Bappenas, 2004)

Keuangan pemerintah (*government-finance*) umumnya di negara berkembang memainkan peranan yang penting dalam upaya mengakselerasi pembangunan, karena pemerintah dianggap mampu memobilisasi sumber dana domestik untuk mendukung investasi melalui pembangunan infrastruktur sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya meningkatkan kesempatan kerja melalui efek *multiplier*. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan dana publik yang besar untuk kegiatan belanja publik dalam hal pengadaan infrastruktur yang memadai untuk menunjang proses pembangunan, sementara sektor swasta dianggap belum mampu menciptakan akumulasi publik yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut.

Sesuai dengan argumen Keynes mengenai pengeluaran pemerintah, bahwa pengeluaran pemerintah diperlukan untuk mempengaruhi permintaan agregat melalui kebijaksanaan fiskal yang bersifat ekspansif atau kontraktif pada kondisi perekonomian. Pengeluaran pemerintah yang terutama terdiri dari pengeluaran konsumsi dan investasi dibiayai dari berbagai sumber, dalam hal ini sumber terbesar diharapkan berasal dari pajak. Pengeluaran pemerintah serta pembiayaannya menimbulkan berbagai efek terhadap kegiatan ekonomi dan bagi pelaku ekonomi dalam masyarakat melalui efek multiplier.

Pengeluaran pemerintah praktis dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi pada umumnya, bukan saja karena pengeluaran ini dapat menciptakan berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, tetapi juga merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat yang kemungkinannya akan mendorong produksi domestik. (Anwar, 1986).

Salah satu masalah yang timbul sehingga mengundang peran pemerintah dalam menanggulangnya terutama dalam pembangunan yakni adanya penyediaan barang public. *Free riders problems*, yakni penerima manfaat yang tidak bersedia menanggung beban produksi sehingga sulit diproduksi secara menguntungkan oleh pelaku ekonomi swasta, sehingga menjadikan suatu pembenaran atas intervensi pemerintah. Bahkan di negara-negara berkembang, penyediaan barang publik tersebut merupakan alasan utama penguatan struktur pemerintah dalam hal peranan sektor pemerintah dalam stabilitas ekonomi.

Model yang dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar.

Di dalam makro ekonomi tradisional Keynesian terdapat beberapa macam pengeluaran pemerintah yang dapat memberikan kontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang tinggi menyebabkan peningkatan kesempatan kerja, investasi dan profitabilitas akan mempengaruhi permintaan agregat melalui efek multiplier. Dengan demikian pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat dan selanjutnya akan mendorong kenaikan output tentu saja efek tersebut tergantung pada efektivitas dan besarnya multiplier perbelanjaan tersebut. (Diamond, 1989)

Hubungan antara tingkat suku bunga investasi adalah berhubungan terbalik, yaitu apabila suku bunga tinggi untuk melakukan investasi merosot dan sebaliknya apabila suku bunga rendah maka gairah untuk melakukan investasi meningkat. Investor melakukan investasi untuk mendapatkan keuntungan. Tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi yang akan diperoleh dan mengurangi minat investor menanamkan modalnya. Semakin rendah suku bunga, semakin tinggi keuntungan yang diperoleh dan akan menambah minat investor untuk menanamkan modalnya. Tingkat suku bunga juga merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki dalam peningkatan ekspansi kredit perbankan. Untuk ekspansi kredit perbankan ini maka tingkat suku bunga harus diturunkan. Penurunan tingkat suku bunga ini merupakan motivator bagi masyarakat untuk mengambil kredit untuk kegiatan konsumtif dan yang paling penting penurunan tingkat suku bunga ini akan mendorong para investor untuk mengambil kredit perbankan yang selanjutnya digunakan untuk kegiatan investasi.

Dengan meningkatnya kegiatan investasi ini maka akan terbuka lapangan-lapangan kerja baru, yang selanjutnya akan menyerap banyak tenaga kerja dan kemudian

pendapatan perkapita masyarakat akan meningkat, kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang diinginkan pun tercapai.

Ekspor merupakan salah satu komponen pengeluaran agregat, oleh sebab itu ekspor dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai. Apabila ekspor bertambah, pengeluaran agregat bertambah tinggi dan selanjutnya akan menaikkan pendapatan nasional. Ekspor dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dimana seperti diketahui bahwa ekspor tersebut terdiri dari ekspor migas dan non migas. Besarnya kemampuan mengekspor suatu negara otomatis dapat menghasilkan penerimaan devisa yang besar. Devisa yang diterima inilah yang dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan. (Muhammad, 2007)

Manfaat dari meningkatnya produktivitas dalam sektor ekspor dan sebagai akibatnya meningkatnya pendapatan riil yang kemudian akan menyebar ke seluruh perekonomian negara tersebut, menimbulkan kondisi yang disebut *export-led growth*. (Hakim, 2002)

Manfaat dari meningkatnya produktivitas dalam sektor ekspor dan sebagai akibatnya meningkatnya pendapatan riil yang kemudian akan menyebar ke seluruh perekonomian negara tersebut, menimbulkan kondisi yang disebut *exported growth*, atau pertumbuhan yang disebabkan oleh hasil ekspor. Jika, sebagai hasil dari perdagangan, pendapatan nasional meningkat sehingga tabungan meningkat, sehingga investasi produktif meningkat, dan kemudian pertumbuhan pendapatan nasional meningkat, maka pertumbuhan pendapatan nasional tersebut bisa dipandang sebagai manfaat dinamis lebih jauh dari perdagangan internasional.

Sementara itu devisa yang diperoleh dari hasil ekspor digunakan untuk menghasilkan output yang lebih besar. Dengan meningkatnya output dalam negeri maka

akan mendorong pula pertumbuhan ekonomi (PDB), sehingga secara otomatis jika PDB tersebut meningkat maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional (GNP).

C. Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pembangunan dan kredit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui investasi swasta dan ekspor di Indonesia tahun 1992-2006.

Pengeluaran pemerintah utamanya pengeluaran pembangunan dalam hal ini mempengaruhi pembangunan ekonomi bukan saja karena pengeluaran tersebut dapat menciptakan berbagai sarana yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur, namun juga merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat atau dengan kata lain pemerintah melakukan belanja publik dengan membeli berbagai keperluan untuk pembangunan berbagai sarana dan pembelian atau permintaan agregat ini akan mendorong kenaikan output. Pengeluaran pemerintah mendorong proses akumulasi kapital dan investasi swasta.

Pembangunan infrastruktur juga berpengaruh langsung terhadap kegiatan perdagangan internasional. Pembangunan sarana-sarana ekonomi seperti listrik, telekomunikasi, pelabuhan, jalan dan lain-lain untuk mendukung laju perdagangan internasional dan pembangunan sarana-sarana ini dapat mengurangi hambatan-hambatan kemampuan pasar untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mengurangi akses yang seharusnya terbuka untuk partisipasi yang lebih luas. Efisiensi pemanfaatan dari prasarana yang ada, dan membangun sektor-sektor lainnya termasuk teknologi nasional juga mendorong kegiatan ekspor. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dapat mencegah ekonomi biaya tinggi.

Ketersediaan (*stock*) infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi terkait sangat erat. Pembangunan infrastruktur diyakini mampu menggerakkan sektor riil, menyerap tenaga kerja, meningkatkan konsumsi masyarakat dan pemerintah, serta memicu kegiatan produksi. Dengan pembangunan, sektor infrastruktur dipahami secara luas sebagai *enabler* terjadinya kegiatan ekonomi produktif di sektor-sektor lain. Jika perekonomian merupakan “mobil”, maka infrastruktur adalah “roda” yang memungkinkan “mobil” tersebut bergerak dan melaju. Di samping itu, infrastruktur merupakan salah satu unsur faktor produksi, misalnya listrik dikonsumsi industri untuk menghasilkan produk. Infrastruktur juga menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Air minum dan sanitasi yang baik, transportasi yang terjangkau serta ketersediaan listrik, merupakan kebutuhan dasar di masyarakat modern. (Bappenas, 2003)

Tingkat suku bunga merupakan variabel penting dalam suatu perekonomian, karena merupakan faktor penentu kegiatan investasi dan kegiatan ekspor serta penentu permintaan agregat. Apabila tingkat suku bunga rendah, volume investasi adalah tinggi, sedangkan apabila tingkat suku bunga tinggi, maka permintaan akan uang pada perbankan untuk mengadakan investasi rendah. Secara umum makin rendah tingkat bunga yang akan dibayar para pengusaha semakin banyak usaha yang dapat dilakukan.

Dengan adanya tingkat suku bunga yang rendah, terutama suku bunga kredit akan menyebabkan jumlah uang beredar di masyarakat akan meningkat, dan peningkatan jumlah uang beredar ini akan digunakan oleh para investor untuk melakukan kegiatan investasi sehingga akan terjadi peningkatan kegiatan investasi. Peningkatan kegiatan investasi ini berimplikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena dengan adanya investasi maka akan terbuka lapangan-lapangan kerja baru dan terjadinya pemberdayaan

sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga peningkatan kualitas potensi-potensi yang ada pada suatu negara akan terwujud, dan akan meningkatkan kualitas suatu bangsa melalui pencapaian pertumbuhan ekonomi yang didam-idamkan.

Penurunan tingkat suku bunga kredit perbankan juga dapat mempengaruhi kegiatan ekspor secara langsung. Melalui dana yang disalurkan dari perbankan, eksportir dapat menggunakan dana tersebut untuk membiayai kegiatan-kegiatan ekspor dalam hal pembiayaan untuk transportasi dan komunikasi, perijinan, biaya-biaya administrasi, proses dan prosedur ekspor.

Secara teori tingkat bunga yang tinggi dampaknya menurunkan investasi, tetapi tingkat bunga yang meningkat diharapkan akan menaikkan tabungan masyarakat dan ini dapat digunakan bank untuk mengeluarkan dan mengalirkan dana dari tabungan masyarakat tersebut dalam bentuk kredit perbankan. Dan dana yang disalurkan ke masyarakat tersebut digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan konsumsi, namun kredit konsumsi bukan merupakan kredit yang tergolong produktif dan pemberian kredit kepada sektor-sektor non produktif oleh bank jelas tidak sejalan dengan tujuan pemberian kesempatan kepada bank untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi nasional karena tidak adanya keuntungan yang dipetik pemerintah dalam bentuk tambahan kemampuan penyediaan kredit dari industri perbankan untuk pembangunan perekonomian Indonesia.

Penurunan tingkat suku bunga kredit tersebut akan mendorong para pengusaha untuk melakukan pinjaman di bank untuk melakukan kegiatan ekonomi, menghasilkan barang dan jasa sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi dan dari kegiatan tersebut

tercipta pertumbuhan ekonomi, diharapkan mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga tercipta welfare atau kesejahteraan masyarakat seperti yang diinginkan.

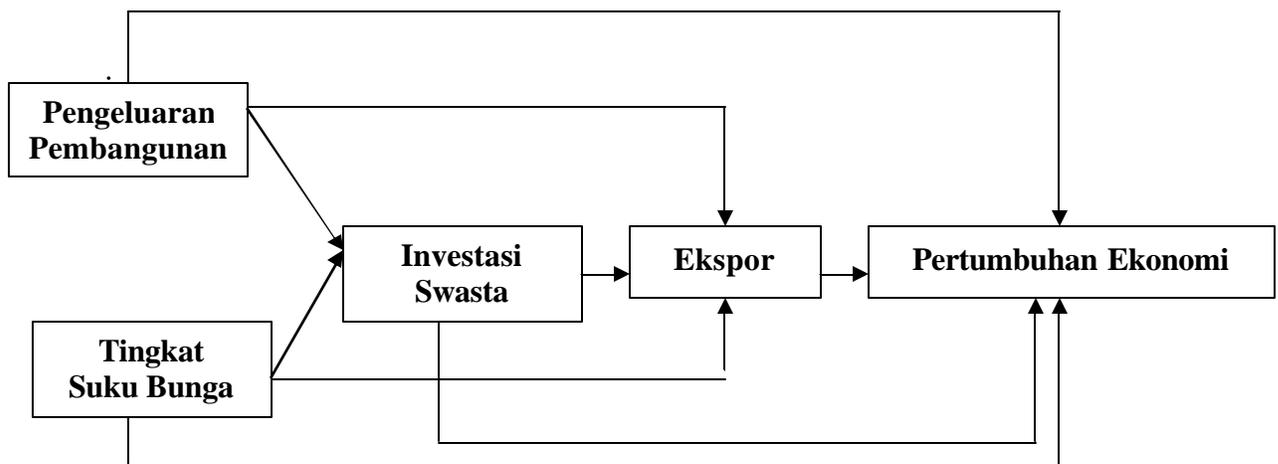
Peningkatan kegiatan investasi itu senantiasa sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, karena investasi merupakan variabel makro ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (dalam hal ini PDB), melalui efek penggandanya (*multiplier effect*). Maka itu setiap negara senantiasa berusaha menarik investor ke negaranya untuk melakukan investasi dengan cara memberikan kemudahan-kemudahan dan jaminan-jaminan bagi para investor. Misalnya saja penetapan pajak investasi yang rendah dan pemberian jaminan keamanan bagi para investor. Hal tersebut membuktikan bahwa betapa pentingnya kegiatan investasi dalam suatu negara. Dengan adanya kegiatan investasi, maka akan membuka lapangan-lapangan kerja baru, sehingga akan menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran (*unemployment*). Dengan terserapnya banyak tenaga kerja maka akan menambah pendapatan perkapita masyarakat yang selanjutnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan akan tercapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

Seperti diketahui bahwa ekspor mempunyai peranan yang penting dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ekspor merupakan salah satu sumber devisa suatu negara. Devisa yang diterima dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan dalam pembangunan. Ekspor menunjang perekonomian Indonesia, karena ekspor tidak saja sebagai sumber penerimaan devisa tetapi juga sebagai perluasan pasar bagi produksi barang-barang domestik dan penyerap tenaga kerja. Di satu pihak untuk mendorong terlaksananya pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan investasi terutama investasi swasta. Investasi tersebut dapat diperoleh dari dalam negeri maupun penanaman modal

luar negeri. Dengan adanya investasi tersebut maka akan mendorong berlangsungnya proses produksi sehingga dapat menghasilkan output. Sementara itu devisa yang diperoleh dari hasil ekspor dapat digunakan untuk menghasilkan output yang lebih besar. Dengan meningkatnya output dalam negeri maka akan mendorong pula pertumbuhan ekonomi (PDB) sehingga secara otomatis jika PDB tersebut meningkat maka pendapatan nasional akan meningkat.

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang hubungan pengeluaran pemerintah dan tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta dan ekspor, maka dapat dilihat dari gambar berikut :

Gambar 1. Alur Kerangka Pikir Hubungan antara Pengeluaran Pembangunan dan Tingkat Suku Bunga terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Peranan Investasi Swasta dan Ekspor.



Kerangka konseptual dalam menganalisis pengaruh APBN (pengeluaran pembangunan) dalam hal ini belanja publik pemerintah (X_1), tingkat suku bunga (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_3) melalui investasi swasta (Y_1) dan ekspor (Y_2)

tergantung pada asumsi eksogenitas dan endogenitas suatu variabel yang ingin diteliti. Dalam konteks itu, untuk mengamati pengaruh APBN dan tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta dan ekspor, yang menjadi variabel eksogen adalah APBN dan tingkat suku bunga, sedangkan investasi swasta, ekspor, dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel endogen. Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah *Structural Equation Modelling* (SEM) yang diformulasikan sebagai berikut :

Pada saat investasi swasta dipengaruhi oleh pengeluaran pembangunan dan tingkat suku bunga, investasi swasta sebagai variabel dependen sedangkan pengeluaran pembangunan dan tingkat suku bunga sebagai variabel independen, sehingga dapat dituliskan dalam bentuk fungsi :

$$Y_1 = f(X_1, X_2) \dots \dots \dots (1)$$

Pada saat ekspor dipengaruhi oleh pengeluaran pembangunan, tingkat suku bunga dan investasi swasta, ekspor sebagai variabel dependen dan pengeluaran pembangunan, tingkat suku bunga dan investasi swasta sebagai variabel independen.

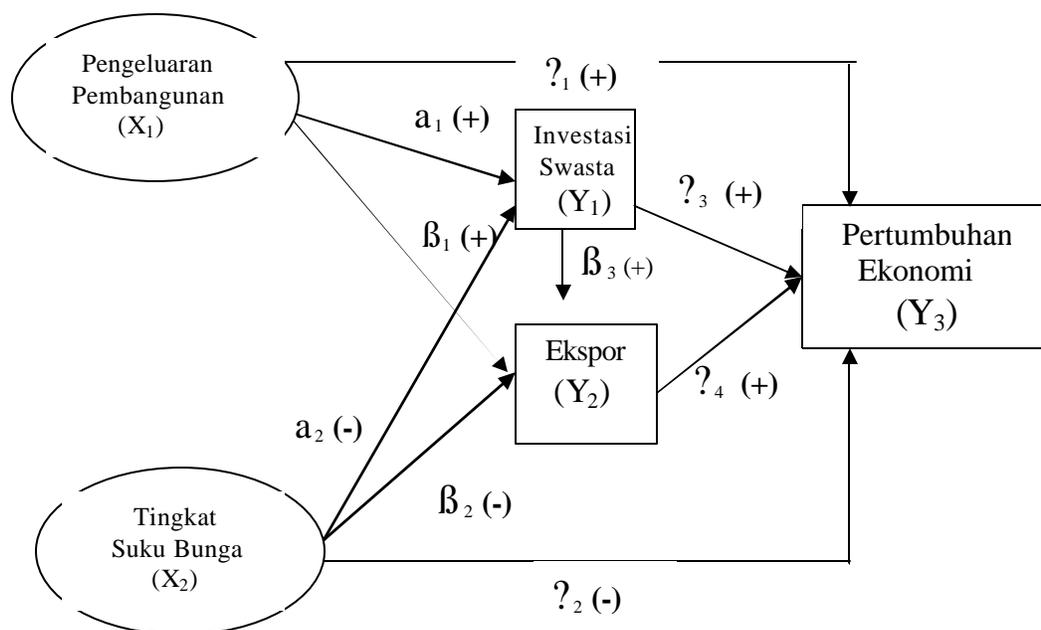
$$Y_2 = f(X_1, X_2, Y_1) \dots \dots \dots (2)$$

Pada saat pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pengeluaran pembangunan, tingkat suku bunga, investasi swasta dan ekspor. Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan tingkat suku bunga, investasi swasta, dan ekspor sebagai variabel independen, sehingga dapat dituliskan dalam bentuk fungsi :

$$Y_3 = f(X_1, X_2, Y_1, Y_2) \dots \dots \dots (3)$$

Persamaan di atas merupakan fungsi atau sistem persamaan simultan, seperti dalam gambar berikut :

Gambar 2. Sketsa Model Struktural (SEM)



Catatan :

- X₁ = Pengeluaran Pembangunan (belanja publik)
- X₂ = Tingkat Suku Bunga
- Y₁ = Investasi Swasta (realisasi PMA dan PMDN)
- Y₂ = Ekspor
- Y₃ = Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian ini dikembangkan dengan suatu kerangka empiris dalam menemukan berbagai hasil terutama terkait dimana pertumbuhan ekonomi yang sering diukur salah (*underestimated*). Pada gilirannya hasil penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang pengaruh pengeluaran pembangunan, tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi swasta dan ekspor, sehingga dalam kerangka makro akan bermanfaat sebagai salah satu informasi penting dalam menentukan dan menganalisis pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pembangunan lainnya.

D. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang telah diajukan sebelumnya maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga pengeluaran pembangunan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun melalui investasi swasta dan ekspor.
2. Diduga tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun melalui investasi swasta dan ekspor.